

**TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PADA PEMERINTAH  
DAERAH  
(Studi pada Pemerintah Daerah di Indonesia di tingkat Kabupaten/Kota dan  
Provinsi)**



**TESIS**

Oleh:

Nama: Muhammad Fadhly Rizky Octavio

No. Mahasiswa: 19919038

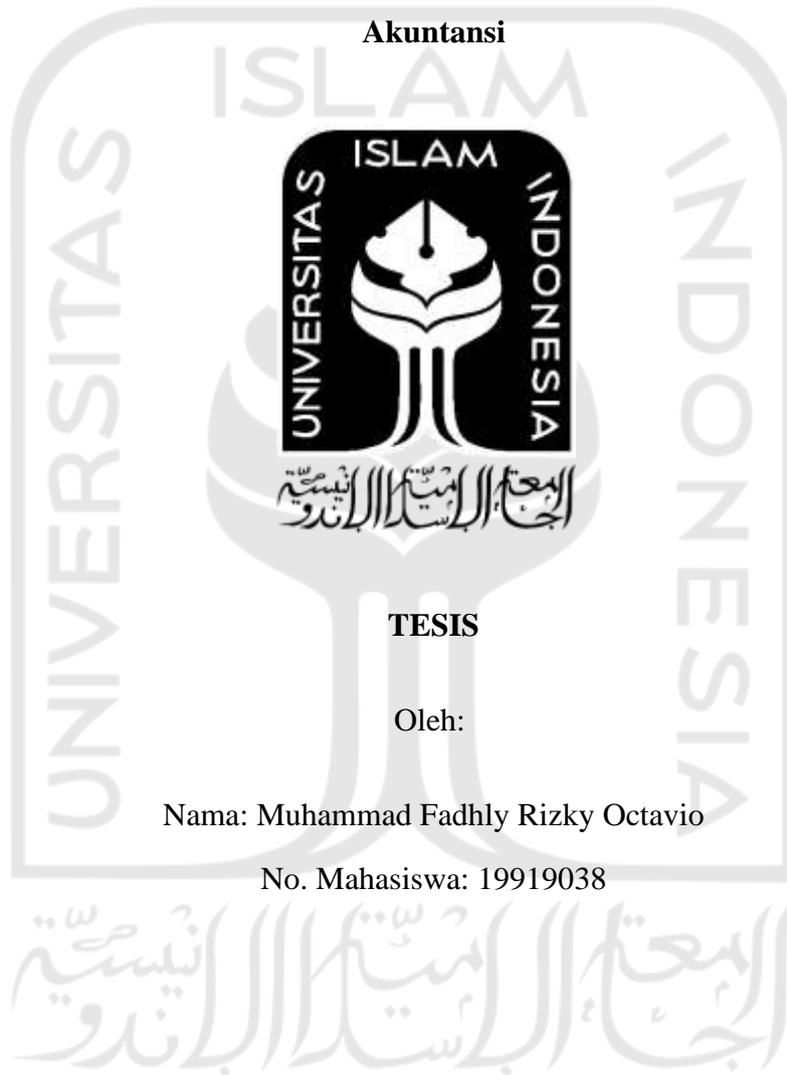
**MAGISTER AKUNTANSI  
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2022**

**TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PADA PEMERINTAH  
DAERAH  
(Studi pada Pemerintah Daerah di Indonesia di tingkat Kabupaten/Kota dan  
Provinsi)**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister**

**Akuntansi**



**TESIS**

Oleh:

Nama: Muhammad Fadhly Rizky Octavio

No. Mahasiswa: 19919038

**MAGISTER AKUNTANSI  
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2022**

## BERITA ACARA UJIAN TESIS

Pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 Program Studi Akuntansi Program Magister, Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia telah mengadakan ujian tesis yang disusun oleh :

**MUHAMMAD FADHLY RIZKY OCTAVIO**

No. Mhs. : 19919038

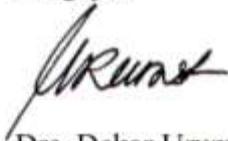
Konsentrasi : Akuntansi Pemerintahan

Dengan Judul:

**TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PADA PEMERINTAH DAERAH (Studi pada Pemerintah Daerah di Indonesia di tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi)**

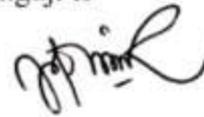
Berdasarkan penilaian yang diberikan oleh Tim Penguji,  
maka tesis tersebut dinyatakan **LULUS**

Penguji I



Drs. Dekar Urumsah, S.Si., M.Com., Ph.D., CFrA.

Penguji II



Johan Arifin, SE., M.Si., Ph.D.

Mengetahui

Tim Penguji Program Studi,



Drs. Dekar Urumsah, S.Si., M.Com., Ph.D., CFrA.

## **PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME**

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Master di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sangsi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 19 Maret 2022

Penulis,

A handwritten signature in black ink is written over a pink decorative stamp. The stamp features a central emblem and some text, though it is partially obscured by the signature.

**(M Fadhly Rizky Octavio)**

**HALAMAN PENGESAHAN**



Yogyakarta, 14 Maret 2022

Telah diterima dan disetujui dengan baik oleh :

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dekar Urumsah', is placed below the title 'Dosen Pembimbing'.

Drs. Dekar Urumsah, S.Si., M.Com., Ph.D., CFrA.

## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum wr.wb*

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa Allah SWT, atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Shalawat serta salam tak lupa pula penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan pengikut beliau yang masih setia mengikuti dan mengamalkan ajarannya hingga saat ini.

Penelitian berjudul “Transparansi dan Akuntabilitas pada Pemerintah Daerah” (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah di Indonesia ditingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi) disusun untuk memenuhi tugas akhir yaitu tesis sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan Program Magister (S2) pada program studi Akuntansi di Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

Proses penyusunan Tesis ini tentunya tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, Tuhan Semesta Alam yang mencintai hamba-Nya dengan senantiasa memberikan kesehatan, kesempatan, kemudahan, serta menjawab setiap doa hamba-Nya dalam menjalani segala aktivitas sebagai seorang muslim yang berjuang menuntut ilmu di jalan-Nya.
2. Nabi Muhammad SAW, sebagai suri tauladan bagi seluruh khalifah di muka bumi. Semoga keteladanan beliau dalam segala hal akan terus

menjadi pedoman bagi penulis dalam memperbaiki diri dengan menjalani kehidupan sebagai seorang muslim.

3. Ir. Sasongko dan Yunita Respati Dewi. S.H selaku orang tua penulis yang telah memberikan doa, motivasi, dorongan, semangat dan rasa tanggung jawab bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir (tesis) ini dengan semangat.
4. Rosita Hermadhani yang selalu memberikan doa, dukungan, setia menemani dan mengingatkan untuk mengerjakan tesis.
5. Terimakasih kepada Rektor Universitas Islam Indonesia Bapak Prof Fathul Wahid, ST, M,Sc, Ph.D., Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII Bapak Prof. Jaka Sriyana, S.E., M.Si., Ph.D, Ketua Jurusan Akuntansi FBE UII Bapak Johan Arifin, SE., M.Si., Ph.D dan Ketua Program Studi Magister akuntansi Bapak Dekar Urumsah, Drs., S.Si., M.Com (IS)., Ph.D atas segala fasilitas dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan lancar.
6. Bapak Dekar Urumsah, Drs., S.Si., M.Com (IS)., Ph.D selaku dosen pembimbing Tesis penulis yang telah membimbing penulis dengan sabar dan selalu memberikan motivasi kepada penulis untuk dapat selalu rajin mengarahkan Tesis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis tepat pada waktunya.
7. Bapak Johan Arifin, SE., M.Si., Ph.D. Selaku Dosen Penguji yang banyak memberikan pengarahan dan masukan.

8. Bapak Aditya Pandu Wicaksono, SE., M.Ak., Ak. Bapak Dosen yang selalu memberi masukan dan membantu dalam proses penyusunan tesis
9. Teman-Teman Jack Office (Alumni BAC) Adel, Ivana, Aulia, Anggun, Rendra, Gilang.
10. Teman Teman Magister Akuntansi FBE UII
11. Tim Muzzafar Zayn Imerina Zuhara, Agnes Aura, Valdo Magry, Farhan Kamil, Nicho Kurniawan.
12. Tim Antares Humam, Saphira, Erlan, Bayu, Dyah yang sudah membantu dalam mengumpulkan data
13. Kepada seluruh pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih atas doa, semangat dan motivasinya.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan berkah, rahmat dan hidayah-Nya bagi Papa, Mama, Saudara dan teman-teman yang telah membantu penulis dalam segala hal. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran masih diperlukan dan harap disampaikan untuk menyempurnakannya.

*Wassalamualaikum wr.wb*

Penulis,



(M Fadhlly Rizky Octavio)

## ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah menguji faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap tingkat transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah di Indonesia yaitu ukuran pemerintah daerah, kualitas laporan keuangan, dan kematangan *e-Government*. Teori yang digunakan yaitu teori legitimasi dan teori keagenan. Pendekatan yang digunakan yaitu kuantitatif dengan mengambil data sekunder dari 541 website pemerintah daerah dan laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2020. Penelitian ini menggunakan alat analisis SmartPLS 3.0. Metode yang digunakan yaitu PLS-SEM dengan Uji Regresi Liner Berganda. Dari hasil pengujian yang dilakukan, diketahui bahwa ukuran pemerintah daerah, kualitas laporan keuangan, dan maturitas *e-Government* berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat transparansi dan akuntabilitas di pemerintah daerah. Implikasi dari penelitian ini adalah dengan semakin terbukanya informasi pemerintah daerah maka masyarakat dapat mengakses dimana saja dan kapan saja melalui perangkat seluler sehingga masyarakat dapat memonitoring aktivitas pemerintah.

**Kata Kunci:** Akuntabilitas, Transparansi, Ukuran Pemerintah daerah, Kualitas Laporan Keuangan, Kematangan *e-Government*.

## **ABSTRACT**

*The purpose of this research is to provide empirical evidence that the size of local governments, the quality of financial statements, and the maturity of e-Government affect the level of transparency and accountability of local governments in Indonesia. The theory used is legitimacy theory and agency theory. The approach used is quantitative by taking secondary data from 541 local government websites and local government financial statements in 2020. This study uses the SmartPLS 3.0 analysis tool. The method used is PLS-SEM with Multiple Linear Regression Test. From the results of the tests conducted, it is known that the size of the local government, the quality of financial statements, and the maturity of e-Government have a significant positive effect on the level of transparency and accountability in local governments. The implication of this study is that with the increased disclosure of local government information, the public can access it at any time via mobile devices so that the public can monitor government activities.*

**Keywords:** *Accountability, Transparency, Size of Local Government, Quality of Financial Statements, Maturity of e-Government.*

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Judul</b> .....	<b>i</b>
<b>pernyataan Bebas Plagiarisme</b> .....	<b>iv</b>
<b>Halaman Pengesahan</b> .....	<b>v</b>
<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>vi</b>
<b>Abstrak</b> .....	<b>ix</b>
<i>Abstract</i> .....	<b>x</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>i</b>
<b>Daftar Tabel</b> .....	<b>iv</b>
<b>Daftar Lampiran</b> .....	<b>iv</b>
<b>BAB I Pendahuluan</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Batasan Masalah.....	7
1.4 Tujuan Penelitian.....	8
1.5 Manfaat Penelitian.....	8
1.6 Sistematika Penulisan.....	9
<b>BAB II Kajian Teori dan Pengembangan Hipotesis</b> .....	<b>1</b>
2.1 Teori Legitimasi .....	1
2.2 Teori Keagenan ( <i>Agency Theory</i> ).....	2
2.3 <i>Good Governance</i> .....	3
2.4 Akuntabilitas.....	4
2.5 Transparansi .....	6
2.6 Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Akuntabilitas Dan Transparansi.....	7
2.6.1 Ukuran Pemerintah Daerah .....	7
2.6.2 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah .....	9
2.6.3 Kematangan <i>E-Government</i> .....	12
2.7 Penelitian Terdahulu.....	17
2.8 Pengembangan Hipotesis.....	23
2.8.1 Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Transparansi .....	23
2.8.2 Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Akuntabilitas.....	24

2.8.3 Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Transparansi .....	26
2.8.4 Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Akuntabilitas.....	27
2.8.5 Pengaruh Kematangan <i>E-Government</i> Pemerintah Daerah Terhadap Transparansi .....	28
2.8.6 Pengaruh Kematangan <i>E-Government</i> Pemerintah Daerah Terhadap Akuntabilitas.....	29
2.9 Kerangka Penelitian.....	30
<b>BAB III Metode Penelitian.....</b>	<b>32</b>
3.1 Metodologi Penelitian .....	32
3.2 Populasi Dan Sampel.....	32
3.3 Teknik Dan Metode Pengumpulan Data .....	32
3.4 Pengukuran Variabel Dan Definisi Variabel Operasional.....	33
3.5 Uji Statistik.....	37
3.5.1 Uji Statistik Deskriptif.....	37
3.5.2 Metode Analisis <i>Structural Equation Modeling</i> (SEM).....	38
3.5.3 <i>Partial Least Square</i> (PLS) .....	38
3.6 Analisa Model Struktural ( <i>Inner Model</i> ).....	39
3.7.1 <i>R-Square</i> ( $R^2$ ).....	39
3.7.2 <i>Q-Square</i> ( $Q^2$ ) <i>Predictive Relevance</i> .....	40
3.7.3 Uji Signifikansi.....	40
3.8 Model Fit .....	41
3.9 Uji Hipotesis.....	41
<b>BAB IV Hasil dan Analisis Penelitian.....</b>	<b>43</b>
4.1 Deskripsi Hasil Pengumpulan Data.....	43
4.2 Analisis Model Struktural.....	46
4.3 Model Fit .....	47
4.4 Pengujian Hipotesis .....	48
4.3 Hasil Penelitian Dan Pembahasan.....	50
4.4.1 Ukuran Pemerintah Daerah Berpengaruh Terhadap Tingkat Transparansi .....	50

4.4.2 Ukuran Pemerintah Daerah Berpengaruh Terhadap Tingkat Akuntabilitas Pemerintah Daerah.....	52
4.4.3 Kualitas Laporan Keuangan Berpengaruh Terhadap Tingkat Transparansi Pemerintah Daerah.....	53
4.4.4 Kualitas Laporan Keuangan Berpengaruh Terhadap Tingkat Akuntabilitas Pemerintah Daerah.....	55
4.4.5 Kematangan <i>E-Government</i> Berpengaruh Terhadap Tingkat Transparansi Pemerintah Daerah.....	56
4.4.6 Kematangan <i>E-Government</i> Berpengaruh Terhadap Tingkat Akuntabilitas Pemerintah Daerah.....	58
<b>BAB V Penutup .....</b>	<b>60</b>
5.1 Kesimpulan.....	60
5.2 Kontribusi Dan Implikasi .....	61
5.2.1 Kontribusi .....	61
5.2.2.Implikasi .....	62
5.3 Keterbatasan Penelitian Dan Saran .....	63
5.3.1 Keterbatasan .....	63
5.3.2 Saran.....	63
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>65</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu .....	18
Tabel 3. 1 Indikator Akuntabilitas .....	34
Tabel 3. 2 Indikator Transparansi .....	35
Tabel 3. 3 Indikator Ukuran Pemerintah Daerah .....	35
Tabel 3. 4 Indikator Kualitas Laporan Keuangan .....	36
Tabel 3. 5 Indikator Kematangan <i>e-Government</i> .....	37
Tabel 4. 1 Tingkat Pemerintah Daerah .....	43
Tabel 4. 2 Deskriptif Data .....	44
Tabel 4. 3 Analisis R-Square .....	46
Tabel 4. 4 Analisis Q-Square .....	47
Tabel 4. 5 Hasil Uji Hipotesis .....	48

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Penelitian .....	31
---------------------------------------	----

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. 1 Hasil Olah Data .....	69
Lampiran 1. 2 Daftar Pemerintah daerah dan Hasil Pengumpulan Data Variabel	70
Lampiran 1. 3 Model Penelitian .....	92

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Dewasa ini masyarakat menginginkan dan berharap agar pemerintah dapat melaksanakan kinerja terbaiknya. Masyarakat, sebagai *stakeholder* mayoritas pemerintah, menginginkan sebuah hasil dari kinerja yang dapat mereka rasakan. Oleh sebab itu, para pejabat pemerintah perlu melakukan *Governance* pemerintahan yang baik, agar dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat. Salah satu yang diinginkan oleh masyarakat yaitu *Governance* yang demokratis. Hal ini memerlukan akuntabilitas dan transparansi dalam mengungkapkan lebih banyak informasi anggaran keuangan, termasuk di dalamnya aktifitas yang dilakukan pemerintah (Adiputra, *et al.*, 2018). Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua dari lima prinsip *Good Governance*.

*Good Governace* merupakan penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, hal ini sejalan dengan prinsip demokratis untuk menghindarkan dari tindakan korupsi, menjalankan disiplin anggaran, penciptaan legal dan *political framework* (Mardiasmo, 2018). Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) menerbitkan sebuah pedoman *good public governance* Indonesia yang menjelaskan bahwa terdapat lima asas yang dapat diterapkan oleh pemerintah yaitu transparansi, demokrasi, akuntabilitas, budaya hukum, kewajaran dan kesetaraan. Dari kelima asas tersebut transparansi dan akuntabilitas mengandung unsur pengungkapan (*disclosure*), penyediaan informasi memadai yang mudah diakses oleh pemangku kepentingan (Wilopo, 2017). Keterbukaan

informasi dan pengungkapan penting dilakukan oleh pemerintah untuk menarik kepercayaan dari pemangku kepentingan. Selain itu dengan pengungkapan dan keterbukaan informasi maka akan meminimalisir tindakan korupsi (Adiputra, *et al.*, 2018).

Transparansi dan akuntabilitas menjadi topik sorotan di tengah masyarakat. Dewasa ini masyarakat memiliki harapan agar pemerintahan menjadi transparan dan akuntabel. Masyarakat tidak menginginkan tindakan korupsi terjadi di dalam pemerintahan. Hal ini disebabkan tindakan korupsi akan merugikan keuangan negara yang memberikan dampak terhambatnya pembangunan negara dan kesejahteraan masyarakat. Pandemi *Covid-19* yang terjadi saat ini memberikan efek terhadap perekonomian menjadi terpuruk, sehingga negara perlu melakukan *Governance* yang tepat berkaitan dengan keuangan negara. Pengelolaan keuangan yang baik dapat menjadikan masyarakat sejahtera. Dengan semakin besarnya tuntutan terhadap pengelolaan keuangan yang tepat maka pemerintah perlu menerapkan prinsip transparan dan akuntabel agar tindakan korupsi dapat diminimalisir (Zeyn, 2011).

Bahrullah Akbar selaku pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V/ Anggota V Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan pernyataan bahwa masyarakat saat ini memberikan dorongan terhadap pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangannya. Wujud transparansi dan akuntabilitas, tercermin dalam opini BPK atas penyajian laporan keuangan pemerintah pusat maupun daerah (BPK.go.id, 2020). Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa pemerintah daerah

maupun pusat saat ini berusaha untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dari penggunaan anggaran negara, sehingga pengelolaan dana menjadi tepat sasaran (antaranews.com, 2021). Dengan demikian transparansi dan akuntabilitas memiliki peran penting terhadap pengelolaan keuangan negara, sehingga penggunaan anggaran negara dapat terkontrol dan penggunaannya dapat tepat sasaran (Gunawan, 2016).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 6 Desember 2020 menetapkan Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai tersangka kasus korupsi bantuan sosial (BANSOS) penanganan pandemi Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun anggaran 2020. KPK mengungkapkan kasus korupsi ini bermula dari program pengadaan BANSOS penanganan Covid-19 berupa paket sembako di KEMENSOS Tahun 2020 dengan nilai sekitar Rp 5,9 Triliun dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan dengan 2 periode (Kompas.com, 2021) Dari kasus tersebut dapat diamati bahwa apabila tidak adanya transparansi dan akuntabilitas mungkin saja kasus tersebut tidak dapat diungkap. Pemerintah perlu meningkatkan prinsip transparan dan akuntabel pada pemerintah pusat maupun daerah dengan tujuan meminimalisir terjadinya kasus tindak pidana korupsi yang sama.

Kasus tindak pidana korupsi tidak hanya terjadi pada jajaran pemerintah pusat, namun pemerintah daerah pun tidak luput dari terjadinya tindak pidana korupsi. Sebagai contoh Bupati Musi Banyuasin (Muba) Dodi Reza Alex Noerdin yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Kasus Korupsi ini berkaitan dengan rencana beberapa proyek yang dilakukan oleh PemKab Muba. Dana proyek ini bersumber dari APBD-P tahun anggaran 2021 dan bantuan keuangan provinsi,

diantaranya pada Dinas PUPR Kabupaten Muba (cnnIndonesia.com, 2021). Penerapan prinsip transparan dan akuntabel dimungkinkan dapat mengontrol Dalam penelitian sebelumnya sudah dijelaskan bahwa akuntabilitas dan transparansi menjadi dua prinsip penting terbentuknya *Good Governance*, Teori yang digunakan yaitu teori agensi dan teori legitimasi (Adiputra, et al., 2018; Istikomah, 2017; Trisnawati, 2014). Teori legitimasi dalam hal ini dapat diinterpretasikan bahwa pemerintah ingin mendapatkan pengakuan legitimasi dari para *stakeholder*. Oleh sebab itu pemerintah perlu melaksanakan kegiatan sesuai dengan standar dan keinginan *stakeholder* berupa pelaksanaan prinsip transparan dan akuntabel (Adiputra *et al.*, 2018). Teori lain yang digunakan yaitu teori agensi. Pemerintah daerah sebagai agen yang diberikan wewenang oleh masyarakat, perlu memenuhi keinginan masyarakat (Adiputra *et al.*, 2018). Teori keagenan ini berhubungan dengan masyarakat selaku prinsipal memberikan amanat kepada pemerintah selaku agen untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Istikomah, 2017).

*Size of Government* atau ukuran pemerintah daerah dimungkinkan dapat memengaruhi akuntabilitas dan transparansi. atau ukuran pemerintah daerah dimungkinkan dapat memengaruhi akuntabilitas dan transparansi. Ukuran pemerintahan dapat ditinjau dari seberapa besar aset yang dikuasi oleh pemerintah daerah. Oleh sebab itu pemerintah daerah dengan jumlah aset yang besar maka dapat dioptimalkan untuk melakukan pengawasan. Dengan demikian pengawasan yang ketat menghasilkan tingkat transparansi dan akuntabilitas meningkat (Wilopo, 2017). Ukuran pemerintah daerah dalam hal ini aset dimungkinkan memberikan

pengaruh terhadap pengungkapan informasi keuangan melalui media internet (Trisnawati, 2014). Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Adiputra *et al* (2018), ukuran pemerintah daerah tidak memiliki pengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas

*Quality of Financial Statements* atau Kualitas laporan keuangan dimungkinkan dapat memengaruhi pengungkapan dan publikasi laporan tersebut. Apabila laporan yang disusun oleh suatu daerah sesuai standar, mungkin saja semua kegiatan akan diungkapkan. Adiputra *et al* (2018) menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan melalui opini audit berpengaruh positif signifikan terhadap transparansi pemerintah daerah di Indonesia. Berbeda dengan Wilopo (2017) yang menemukan bahwa kualitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah di Indonesia.

*Maturity of e-Government* atau kematangan *e-Government*. Pemerintah daerah saat ini telah mengembangkan aplikasi atau situs web yang mendukung kinerja dari pemerintahan. 34 provinsi di Indonesia telah memiliki situs *website* sebagai media *e-Government* pemerintahan. Dengan adanya bantuan dan dukungan dari *e-Government* membawa dampak meningkatnya pelayanan kepada masyarakat seperti akuntabilitas dan transparansi (Pina *et al.*, 2009). Semakin banyaknya fitur yang sudah diaplikasikan dapat memungkinkan keterbukaan informasi suatu daerah semakin mudah diakses. Fietkiewicz *et al.*, (2017) mengungkapkan setidaknya ada 5 pilar yang mendasari terciptanya kematangan sebuah web *e-Government* yaitu *catalog, communication, transaction, intergrated, participation*. Apabila kelima ini terdapat dalam web *e-Government* pemerintah maka sistem yang dimiliki sudah

semakin maju dan matang. Dengan adanya kemapanan sistem pemerintah boleh jadi lebih mudah mengungkapkan dan menyebarkan informasi terkait kegiatan pemerintah.

Penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi faktor apa saja yang memengaruhi akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah. Saat ini masyarakat sudah sadar akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas pada pemerintahan, ditambah dengan maraknya kasus korupsi oleh pimpinan pemerintah daerah. Hal ini menimbulkan desakan masyarakat agar akuntabilitas dan transparansi pada sektor publik meningkat.

Adiputra, *et al.*, (2018) membahas terkait transparansi pada pemerintah daerah dengan variabel yang mempengaruhi berupa *size of local government, quality of local financial statements, the level of local government response to regulations, political environment*, penelitian ini memfokuskan berkaitan dengan faktor apa saja yang dapat mempengaruhi tingkat transparansi pada pemerintah daerah. Selain itu pada penelitian Latif dan Saadah (2019) membahas berkaitan dengan penerapan *e-Government* terhadap pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi, penelitian ini memberikan gambaran bahwa pentingnya sebuah *e-Government* pada pemerintah daerah. Penerapan sistem *e-Budgeting* ternyata juga memiliki pengaruh yang cukup besar dalam mewujudkan pemerintah daerah yang transparan dan akuntabel (Gunawan, 2016). Oleh sebab itu pada penelitian ini akan membahas terkait pengaruh ukuran pemerintah daerah, kualitas laporan keuangan dan kematangan *e-Government* terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah. Harapan dari penelitian ini untuk memberikan kesadaran pentingnya akuntabilitas dan

transparansi, serta memberikan pengetahuan terkait faktor apa saja yang dapat memengaruhinya.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah ukuran pemerintah daerah memberikan pengaruh terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia.
2. Apakah kualitas laporan keuangan memberikan pengaruh terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia.
3. Apakah kematangan *e-Government* memberikan pengaruh terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia.

## **1.3 Batasan Masalah**

Penelitian ini meneliti terkait beberapa faktor yang diindikasikan berpengaruh terhadap munculnya sifat akuntabel dan transparan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang ada di Indonesia. Guna membatasi pembahasan dan agar tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran oleh sebab itu terdapat pembatasan masalah. Pada penelitian ini terfokus pada penelitian terkait faktor-faktor yang dimungkinkan dapat berpengaruh terhadap akuntabilitas dan transparansi di pemerintah daerah

yang ada di Indonesia yang faktor-faktor tersebut adalah kematangan *e-Government*, Kualitas Laporan Keuangan dan Ukuran pemerintah daerah.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh ukuran pemerintah terhadap terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia
2. Untuk mengetahui pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia
3. Untuk mengetahui pengaruh kematangan *e-Government* terhadap terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat untuk berbagai pihak diantaranya yaitu:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor apa saja yang berpengaruh terhadap akuntabilitas dan transparansi pada pemerintah daerah ditingkat provinsi yang ada di Indonesia. Harapannya penelitian ini memberikan kontribusi teoritis sebuah kerangka atas faktor yang melatarbelakangi terjadinya akuntabilitas dan transparansi. Penelitian ini juga memberikan manfaat berupa pengetahuan terkait akuntabilitas dan transparansi terkait kegiatan pemerintahan ditingkat pemerintahan daerah ditingkat provinsi yang ada di Indonesia.

## 2. Manfaat Praktik

Selain manfaat teoritis penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada beberapa pihak:

- **Masyarakat**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada masyarakat dengan memberikan pengetahuan terkait akuntabilitas dan transparansi di pemerintah daerah ditingkat provinsi sehingga masyarakat dapat membantu untuk pengawasan kinerja pemerintah sehingga terciptanya *Good Governace* dan juga berkurangnya praktik korupsi di pemerintahan.

- **Pemerintah**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pemerintah guna perbaikan agar pemerintah dapat mengetahui faktor apa saja yang dapat mendukung terciptanya akuntabilitas dan transparansi sehingga perbaikan itu dapat meningkatkan kinerja pemerintah dengan menjadikan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta dapat mengurangi praktik-praktik korupsi yang saat ini marak terjadi di pemerintahan daerah.

### 1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan penelitian ini terdiri dari lima bab sesuai dengan sistematika yaitu sebagai berikut:

#### BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah , manfaat penelitian, dan sistematika penelitian

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan membahas tentang landasan teori yaitu berupa pengertian dari teori legitimasi, teori agensi, *Good Governance*, Akuntabilitas, Transparansi dan beberapa faktor yang memengaruhi akuntabilitas dan transparansi di pemerintah daerah.

## BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang penjelasan populasi penelitian dan penentuan sampel penelitian, sumber dan teknik pengumpulan data penelitian, definisi dan pengukuran masing-masing variabel, metode analisis, dan pengujian hipotesis.

## BAB IV HASIL DAN ANALISIS

Bab ini menguraikan tentang hasil dari penelitian serta analisis data dan pembahasan berkaitan dengan pengujian hipotesis.

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan penelitian, kontribusi dan implikasi, keterbatasan dalam penelitian, dan saran – saran untuk penelitian selanjutnya.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Teori Legitimasi**

Teori legitimasi pada umumnya digunakan di literatur akuntansi sosial dan lingkungan. Teori ini mengadopsi asumsi sentral bahwa, pemeliharaan operasi organisasi yang sukses mengkondisikan seorang manajer atau pengelola guna memastikan organisasi yang mereka pimpin berjalan sesuai dengan harapan masyarakat (Deegan, 2018). Teori ini memiliki konsep bahwa manajer diharuskan memberikan kinerja yang optimal agar organisasi yang dipimpinnya diakui berkompeten dan dapat dipercaya masyarakat (Mathews, 1997).

Legitimasi diartikan sebagai kepatuhan Organisasi terhadap pemenuhan harapan Masyarakat. Organisasi akan dianggap tidak sah, apabila organisasi tersebut gagal dalam pemenuhan harapan masyarakat. Dampaknya berupa dikenakan sanksi sosial di tengah masyarakat (Mathews, 1997). Menurut Dowling dan Pfeffer (1975) mengungkapkan bahwa kegiatan organisasi harus sesuai dengan nilai-nilai sosial lingkungan. Sehingga untuk mendapatkan dukungan legitimasi, kegiatan organisasi dan pelaporannya harus sesuai dengan harapan masyarakat. Tuntutan publik terhadap organisasi sektor publik yaitu untuk meningkatkan kualitas, profesionalisme, dan akuntabilitas publik. Menurut Suchman (1995), legitimasi diartikan sebagai persepsi atau asumsi umum bahwa tindakan yang dilakukan sebuah entitas adalah sesuai dengan beberapa regulasi yang ada dan dibangun berdasarkan norma sosial, nilai-nilai keyakinan.

## 2.2 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori agensi merupakan teori yang membahas hubungan antara prinsipal dan agen. hubungan keagenan sebagai kontrak satu orang atau lebih (prinsipal) mempekerjakan orang lain (agen), untuk melakukan beberapa layanan atas nama mereka. Hal ini melibatkan pendelegasian beberapa wewenang pengambilan keputusan kepada agen (Jensen,1976). Prinsipal memberikan kewenangan kepada agen untuk melakukan sebuah tugas untuk kepentingan prinsipal, termasuk pendelegasian otorisasi pengambilan keputusan. Pemerintah daerah sebagai agen yang diberikan wewenang oleh masyarakat wajib memenuhi keinginan dan harapan masyarakat.

Menurut Eisenhardt (1989), teori keagenan berkaitan dengan menyelesaikan dua masalah yang dapat terjadi di dalam hubungan keagenan. Yang pertama adalah masalah keagenan yang muncul ketika keinginan atau tujuan prinsipal dengan agen bertentangan dan sulit bagi prinsipal untuk memverifikasi apa yang sebenarnya dilakukan agen. Permasalahan dalam hal ini adalah terbukti bahwa prinsipal tidak dapat memverifikasi bahwa agen telah berperilaku dengan tepat. Kedua, masalah pembagian risiko yang muncul ketika prinsipal dan agen memiliki sikap yang berbeda terhadap risiko. Hal ini mengindikasikan bahwa prinsipal dan agen mungkin lebih menyukai tindakan yang berbeda karena preferensi risiko yang berbeda.

Hubungan keagenan dapat menimbulkan masalah keagenan berupa asimetri informasi yang mendorong perilaku oportunistik dan konflik kepentingan. Pemerintah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan tentunya memiliki

informasi yang lebih banyak. Kadang-kadang orang menerima informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Masyarakat tentu tidak dapat mengontrol setiap tindakan dan keputusan pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah sebagai penyelenggara kepentingan umum memiliki kemampuan untuk bertindak demi kepentingannya sendiri terlepas dari kepentingan umum (Madinah, 2012).

### **2.3 Good Governance**

Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintahan saat ini berkonsep desentralisasi. Konsep ini berupa Pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah ditingkat daerah untuk mengatur dan pengelolaan sumber daya yang dimiliki daerah. Pemerintah daerah bertugas untuk mengelola sumber daya untuk kesejahteraan masyarakat yang ada di daerah tersebut. Dengan Penerapan *Governance* yang baik bisa jadi mencerminkan kinerja yang baik yang dilakukan oleh pemerintahan daerah tersebut.

Konsep *Good Governance* merupakan konsep yang digunakan sebagai acuan di pemerintahan. *World bank* mengartikan *Good Governance* sebagai pelaksanaan manajemen pembangunan yang solid serta bertanggung jawab. Hal tersebut sejalan dengan prinsip demokratis dan pasar yang efisien. Dalam konsep *Good Governance*, disiplin anggaran menjadi salah satu aspek yang penting, sehingga menghindarkan dari perilaku korupsi. Terdapat beberapa karakteristik dari *Good Governance* menurut *United Nations Development (UNDP)* yaitu Partisipasi, Aturan hukum, transparansi, daya tanggap, orientasi konsensus, kesetaraan, efisiensi dan efektivitas (Mardiasmo, 2018).

Adapun definisi menurut *Council of Europe* (2008) mengartikan *Good Governance* sebagai perilaku dalam hal pelayanan publik dan manajemen sumber daya publik yang bertanggung jawab. Ketika pemerintahan menerapkan prinsip transparan dan akuntabel masyarakat akan mendapatkan informasi terkait pengelolaan jalannya pemerintahan. Dengan semakin baiknya penerapan *good governance*. Hal ini bisa jadi meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Apabila kepercayaan masyarakat meningkat, maka mungkin saja akan mendukung kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

#### **2.4 Akuntabilitas**

Akuntabilitas merupakan pemaparan informasi aktivitas keuangan dan non keuangan pemerintah kepada masyarakat atas pelayanan penyelenggaraan pemerintahan. Akuntabilitas dapat diterjemahkan secara harfiah sebagai sebuah pertanggungjawaban, akan tetapi pemberi artian ini dapat memburamkan arti kata dari *accountability*, apabila dikaitkan dengan pengertian akuntansi serta manajemen (Audyta *et al.*, 2013). Akuntabilitas adalah sebuah penjelasan oleh manajer ketika menghasilkan *output* atau memanfaatkan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi tertentu. Dengan demikian, akuntabilitas manajerial menyangkut pencapaian efisiensi, efektivitas fungsi dan operasional organisasi. (Siriwardhane & Taylor, 2017).

Akuntabilitas publik merupakan sebuah kewajiban pemegang amanah (*agent*) untuk menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas. Kegiatan ini menjadi keharusan sebagai bentuk tanggungjawab kepada pihak pemberi amanah (*Principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta

pertanggungjawaban kepada para pemegang amanah (Mardiasmo, 2018). Pelaksanaan Akuntabilitas publik pemerintah berkewajiban memberikan informasi sebagai bentuk pemenuhan hak-hak publik. Adapun hak-hak publik tersebut yaitu hak untuk tahu (*right to know*), hak untuk diberi informasi (*right to be informed*), hak untuk didengar aspirasinya (*right to be heard and to be listened to*) (Mardiasmo, 2018).

Akuntabilitas publik terdiri dari beberapa aspek, Adapun aspek-aspek tersebut adalah (Hopwood, 1993):

a. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran merupakan akuntabilitas yang menuntut Lembaga publik untuk berperilaku jujur serta melakukan aktifitas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

b. Akuntabilitas Manajerial

Akuntabilitas Manajerial adalah pertanggung jawaban Lembaga publik untuk mengelola organisasi secara ekonomis, efisien dan efektif. Akuntabilitas Manajerial dapat diterjemahkan menjadi akuntabilitas kinerja.

c. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas Program merupakan lembaga-lembaga publik perlu mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai dengan pelaksanaannya. Akuntabilitas program hendaknya program-program tersebut bermanfaat dan berguna bagi masyarakat.

d. Akuntabilitas Kebijakan

Kebijakan-Kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan. Kebijakan yang harus bisa dipertanggungjawabkan dengan mempertimbangkan dampak negatif atau positif yang ditimbulkan.

e. Akuntabilitas Kebijakan

Pemerintah atau Lembaga pemerintahan perlu melaporkan laporan keuangan selama satu periode akuntansi untuk menggambarkan kinerja pemerintah dari perspektif keuangan.

Akuntabilitas sangat penting dalam proses pemerintahan untuk mendukung terjadinya *Good Governance*. Dengan adanya tindakan yang akuntabel, maka tingkat terjadi tindak pidana korupsi dapat diminimalisir dan semua sumber daya yang dikelola dapat dipertanggungjawabkan bahwa benar-benar digunakan untuk kepentingan dan kesejahteraan publik (Imawan, 2019).

## 2.5 Transparansi

Transparansi merupakan salah satu elemen kunci dalam *good governance*, berupa jaminan akses dan kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pengelolaan keuangan publik (Madinah, 2012). Sebagai upaya dalam mewujudkan transparansi publik akuntansi sektor publik berperan dalam pemberian keterbukaan dalam informasi keuangan (Mahmudi, 2011). Transparansi dalam pemerintahan menjamin masyarakat memiliki akses dalam mendapatkan informasi terkait kebijakan serta program - program pemerintah.

Transparansi memiliki makna lain yaitu tersedianya informasi yang cukup dalam bentuk media yang mudah dipahami penggunaannya (Muhtar, 2017). Peraturan mengenai transparansi di Indonesia mulai dari ditetapkannya Undang-Undang 14 tahun 2008 terkait Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Undang-Undang ini mengatur pengelolaan informasi publik pada badan publik termasuk menegaskan bahwa pemerintah daerah sebagai lembaga eksekutif dan penyelenggara daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan daerah merupakan salah satu badan publik yang wajib mengimplementasikan UU KIP.

Transparansi di pemerintahan daerah harus dilaksanakan guna memastikan kebebasan informasi yang sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 188-52/1797/SJ/2012 terkait dengan peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah. Instruksi ini mengatur kewajiban kepala daerah untuk menampilkan sub menu terkait transparansi pengelolaan anggaran daerah di laman web pada daerah masing-masing. Oleh sebab itu pemerintah daerah memiliki beban kewajiban untuk menyebarkan informasi publik dengan cara yang mudah diakses oleh publik dan dalam bahasa yang mudah dipahami (Madinah, 2012).

## **2.6 Faktor-Faktor yang memengaruhi Akuntabilitas dan Transparansi**

### **2.6.1 Ukuran Pemerintah Daerah**

Pemerintah daerah memiliki ukuran yang berbeda-beda. Ukuran pemerintahan ditinjau dari ukuran aset yang dikuasai oleh pemerintah daerah. Penelitian sebelumnya memaparkan bahwa ukuran pemerintah daerah dapat ditinjau dari aset yang dikuasai dan dimiliki (Trisnawati, 2014). Ukuran Pemerintah daerah juga dapat ditinjau dari aspek lain yaitu berdasarkan jumlah penduduk, sehingga

kebutuhan anggaran untuk jumlah penduduk yang sedikit akan berbeda dengan wilayah yang jumlah penduduknya besar. Semakin besarnya penduduk di suatu daerah maka dana yang dibutuhkan akan semakin banyak. Sehingga perlakuan pengelolaan daerah yang jumlah penduduknya kecil dan besar akan berbeda (Manik, 2013). Menurut Kristanto (2009), Ukuran Pemerintah daerah juga dapat diukur dari besar kecilnya pendapatan asli daerah (PAD). Total pendapatan suatu daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan (DAU, DAK, DBH) dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pada penelitian ini menjadikan aset sebagai alat ukur besar kecilnya sebuah pemerintah daerah. Semakin besar ukuran pemerintah daerah maka semakin besar pula kemudahan pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan operasional dan pemerintahan daerah (Sari, 2019). Ukuran pemerintah daerah menjadi aspek penting dalam terciptanya akuntabilitas dan transparansi. Semakin besar aset yang dikelola oleh pemerintah daerah maka masyarakat menuntut untuk diberikan kinerja terbaik (Adiputra, *et al.*, 2018).

#### **2.6.1.1 Aset Pemerintah Daerah**

Aset pemerintah daerah merupakan semua kekayaan daerah, yang dimiliki ataupun dikuasai oleh pemerintah daerah. Aset pemerintah daerah ini berasal dari proses pembelian serta diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan yang lain secara sah. Sebagai contoh aset yang berasal dari sumbangan, hadiah, donasi, wakaf, hibah swadaya, kewajiban pihak ketiga dan dari sumber-sumber yang lain. Kategori aset daerah secara umum dapat dibagi menjadi dua bentuk yaitu aset keuangan dan aset non keuangan. Aset keuangan yaitu aset yang meliputi kas dan

setara kas, piutang, serta surat berharga dalam bentuk investasi jangka panjang atau investasi jangka pendek. Sedangkan aset non keuangan dapat berupa aset tetap, aset lainnya, dan persediaan (Mahmudi, 2010).

Pengelompokan Aset berdasarkan penggunaannya, aset daerah dapat digolongkan menjadi 3 yaitu (Mahmudi, 2010) :

1. Aset daerah untuk keperluan operasi pemerintah daerah yang digunakan untuk kegiatan sehari-hari aparat pemerintah daerah (*Local government used aset*).
2. Aset Daerah yang digunakan oleh masyarakat dalam rangka pelayanan publik. Pemerintah daerah dalam melaksanakan pemerintahan pastinya menyediakan ruang publik serta fasilitas publik yang merupakan bagian dari aset daerah (*Social used aset*).
3. Aset Daerah yang tidak digunakan publik maupun operasional pemerintah (*Surplus Property*). Aset ini merupakan aset yang menganggur dimana seharusnya aset ini bisa dioptimalkan.

Aset daerah akan dituangkan dalam laporan keuangan daerah yang akan ditampilkan dalam laporan neraca yang pada sisi aset atau aktiva. Aset akan ditampilkan terus menerus selama aset tersebut masih ada.

### **2.6.2 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Kualitas laporan keuangan tidak lepas dari aspek yang memengaruhi terjadinya akuntabilitas dan transparansi. Semakin sesuai laporan keuangan dengan Standard sistem informasi akuntansi pemerintahan (SIAP), maka akan mendapat

opini audit baik dari BPK. Dengan baiknya laporan keuangan yang dibuat maka pemerintah daerah cenderung akan mempublikasikannya melalui media internet (Adiputra *et al.*, 2018). Penelitian yang dilakukan oleh Trisnawati (2014) memberikan hasil bahwa opini audit tidak memiliki pengaruh terhadap publikasi laporan keuangan.

Sejalan dengan teori legitimasi sebuah organisasi wajib mengikuti nilai-nilai sosial lingkungan guna mendapatkan dukungan legitimasi dari sebuah kegiatan organisasi, serta pelaporannya sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat. Oleh sebab itu pemerintah daerah harus membuat laporan keuangan sesuai dengan peraturan pemerintah yang dituangkan melalui SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) yang di dalamnya mengatur terkait sistem akrual basis dalam penerapan pencatatannya.

Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 masih bersifat sementara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 36 ayat (1) Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menyatakan bahwa selama pengakuan dan pengukuran pendapatan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, pengakuan dan pengukuran masih berbasis kas. Pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual menurut Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dilaksanakan paling lambat 5 (lima) Tahun. Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 perlu diganti. Lingkup Pengaturan Peraturan Pemerintah ini meliputi SAP Berbasis Akrual dan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual.

Menurut peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 71 Tahun 2010 berisikan terkait standar akuntansi pemerintahan, Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan SAP Berbasis AkruaI ditujukan untuk memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan.

Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan secara sistematis pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan sebagai berikut (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 71 Tahun 2010):

a. Akuntabilitas

Memberikan penjelasan berkaitan dengan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelapor dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan secara berkala.

b. Manajemen

Membantu pengguna mengevaluasi kinerja aktivitas entitas pelapor selama periode pelaporan sehingga memudahkan perencanaan, pengelolaan, pengendalian seluruh aset dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada publik berdasarkan pertimbangan bahwa publik berhak mengetahui secara terbuka

dan menyeluruh tanggung jawab pemerintah dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan kepatuhannya terhadap peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan antar generasi (*intergenerational equity*)

Membantu para pengguna dalam mengetahui penerimaan yang diperoleh pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang akan ikut serta menanggung beban tersebut.

e. Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

### **2.6.3 Kematangan *e-Government***

Dalam Pengimplementasian *e-Government* terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan sehingga menciptakan sistem informasi yang mumpuni (Fietkiewicz, 2017). Kematangan dari *e-Government* dapat juga ditinjau dari aspek kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat (Lakka, 2015). Kematangan *e-Government* juga didefinisikan sebagai sejauh mana pemerintah di suatu negara telah membentuk pelayanan secara *online* kepada masyarakat (Khan & Krishnan, 2019). Adapun 5 pilar yang dapat menjadi ukuran tahapan kematangan sebuah *e-Government* yaitu (Fietkiewicz, 2017):

**a. Pilar 1: penyebaran informasi (katalog)**

Saat ini yang menjadi peran penting adalah konten yang dipublikasikan secara *online*, kegunaan, dan aksesibilitas. Aksesibilitas merupakan faktor penting di situs web mana pun, seperti aksesibilitas terhadap semua informasi yang dimiliki oleh pemerintah. Sehingga informasi terkait pemerintah dapat diakses secara elektronik. Hal ini akan memberikan dampak kepada masyarakat untuk mengakses informasi pemerintah dimana saja dan kapan saja melalui dukungan internet.

**b. Pilar 2: komunikasi**

Pilar kedua menyangkut komunikasi (dua arah), Saat ini semakin banyak aktifitas di dalam Internet. Internet telah menjadi saluran informasi dan komunikasi yang dapat diterima di sektor publik. Penggunaan layanan di situs web memasuki praktik di sektor publik. Dalam pengimplementasian *e-Government*, *website* pemerintah berperan penting guna terjadinya komunikasi 2 arah, sehingga masyarakat dapat berinteraksi secara digital dan *real time* dengan lembaga pemerintahan.

**c. Pilar 3: transaksi**

Pada Pilar ini terdiri dari Layanan *e-Government* finansial dan non-*Financial* transaksional keuangan seperti memperbarui SIM (surat izin mengemudi), pendaftaran pemilih, dan reservasi, membayar pajak dan denda, dll. Faktor penentu keberhasilan untuk semua layanan transaksional adalah kepercayaan pengguna. Kemudahan transaksi menjadi tujuan dari diterapkannya *e-Government*. Masyarakat dapat melakukan transaksi ke

Lembaga pemerintahan dengan mudah tanpa harus datang langsung. Pelayanan seperti ini yang mungkin akan sulit dibangun karena transaksi ini harus benar-benar mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, ketika masyarakat sudah percaya terkait sistem ini, maka kegiatan transaksional secara *Online* dapat berjalan dengan baik.

**d. Pilar 4: Interoperabilitas (integrasi)**

Komponen kunci dari inisiatif *e-Government* adalah kemampuan beberapa organisasi pemerintah dan non-pemerintah untuk berbagi serta mengintegrasikan informasi melintasi batas-batas organisasi. Interoperabilitas mengacu pada properti dari beragam sistem dan organisasi, memungkinkan kerjasama antar organisasi pemerintah. Namun, masih sulit di sebagian besar organisasi pemerintah untuk mencapai interoperabilitas. Ada kebutuhan untuk merancang layanan *e-Government* yang lebih canggih dan kompleks. Perancangan layanan *e-Government* sangat dibutuhkan bagi masyarakat maupun organisasi pemerintah itu sendiri. Hal ini bukan hal yang mudah, apalagi dengan tuntutan masyarakat yang ingin lebih mudah, cepat dan fungsional.

**e. Pilar 5: Partisipasi**

Partisipasi masyarakat dalam penggunaan *e-Government* menjadi salah satu aspek penting dalam kemajuan sistem *e-Government* suatu daerah. Semakin maju dan lengkapnya sistem *e-Government*, maka menyediakan layanan bagi masyarakat dalam memberikan masukan dan saran bagi pemerintah. Pemanfaatan *e-Governance* dalam aspek partisipatif warga perlu dilakukan

guna peningkatan sebuah sistem *e-Governance*. Dalam hal ini masyarakat dengan memanfaatkan fitur partisipasi ini bisa diterapkan dalam hal pemanfaatan *e-Voting* dalam melakukan sebuah pemilihan. Apabila *e-Voting* dapat di kembangkan dengan ditunjang dengan fasilitas yang mendukung maka pemerintah dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat agar dapat turut berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara melalui *e-Government*.

#### **2.6.3.1 *e-Government* Menunjang Transparansi dan Akuntabilitas**

Perkembangan teknologi informasi mendorong pemerintah menerapkan *e-Government* dalam membantu menjalankan pemerintahan. Sistem pemerintah yang dulu dilakukan secara manual diubah seiring berkembangnya teknologi menjadi sistem yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja dengan bantuan internet. Pengembangan *e-Government* di Indonesia mendapat dukungan penuh dari pemerintah, melalui Instruksi Presiden No 3 Tahun 2003. Dengan instruksi ini pemerintah memberikan arahan kepada aparatur pemerintahan termasuk baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah untuk mempersiapkan langkah-langkah dalam penerapan *e-Government*.

Penerapan *e-Government* di pemerintah terus dikembangkan hingga saat ini. Perkembangan *e-Government* ini mendorong pemerintah untuk menciptakan prinsip transparan dan akuntabel. Pada penerapannya, *e-Government* digunakan pemerintah untuk memaparkan hasil dari kinerja pemerintah yang berupa laporan keuangan dan non keuangan. Dengan semakin majunya penerapan *e-Government* di suatu daerah, dapat memberikan dampak terhadap tingkat transparansi dan

akuntabilitas suatu daerah. Penerapan tersebut berupa masyarakat dapat mengakses semua laporan dan rencana kebijakan pemerintah kapan saja dan dimana saja melalui *platform e-Government* yang disediakan oleh pemerintah.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berbasis internet telah memberikan dampak berupa menurunnya biaya untuk mendapatkan dan mendistribusikan informasi (Roberts, 2006). Sebagai hasilnya, beberapa Tahun terakhir telah terlihat tren penggunaan *e-Government* untuk akses yang lebih besar ke informasi. Hal ini memiliki tujuan transparansi, akuntabilitas, dan anti-korupsi (Bertot & Grimes, 2012).

Dengan adanya *e-Government* pemerintah daerah dapat menyajikan informasi aktivitas dan rancangan program-program. Pertanggung jawaban dan keterbukaan informasi dapat mudah dilakukan, sehingga akses masyarakat untuk mendapat informasi dari laman *website* pemerintah menjadi mudah. Berkaitan dengan keterbukaan informasi keuangan pemerintah, maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Pada peraturan tersebut dalam Pasal 13 (b) menyebutkan bahwa informasi keuangan daerah harus disajikan melalui situs resmi pemerintah daerah.

Selain itu terdapat Undang-Undang (UU) Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diterbitkan untuk mengatur kewajiban setiap badan publik untuk mempublikasikan informasi publik kepada publik. Badan publik dalam hal ini termasuk pemerintah daerah. Dari Undang-Undang yang telah dibuat pemerintah

mencerminkan pemerintah mendukung keterbukaan. Dengan adanya keterbukaan informasi yang didapatkan masyarakat maka masyarakat dapat mengetahui kinerja dari pemerintah serta tingkat pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat menjadi lebih tinggi. Oleh karena itu dengan adanya *e-Government* mendukung pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas guna meminimalkan tindakan korupsi (Adiputra *et al.*, 2018).

## **2.7 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terkait Transparansi dan Akuntabilitas melalui analisis *website* telah dilakukan oleh beberapa peneliti lain. Akan tetapi pada penelitian ini memiliki variabel yang berbeda serta waktu yang berbeda dan juga teknik pengumpulan datanya.



**Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Variabel	Metode, Sampel, Alat Analisis, dan Teori	Hasil
1	Adiputra, Utama dan Rossieta (2018)	Independen : <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Size of Local Government</i> (SG)</li> <li>• <i>Quality of Local Financial Statements</i> (QR)</li> <li>• <i>The Level of Local Government Response To Regulations</i> (GR)</li> <li>• <i>Political Environment</i> (PE)</li> </ul> Dependen : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Transparansi (Tp)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kuantitatif</li> <li>• pemerintah provinsi di Indonesia yang memiliki <i>website</i> resmi dan dapat mengakses laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Tahun anggaran 2016</li> <li>• Regresi berganda (SPSS)</li> <li>• Teori Institusional, Teori Legitimasi, Teori Keagenan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• QR =&gt; Tp (didukung)</li> <li>• PE =&gt; Tp (didukung)</li> <li>• SG =&gt; Tp (tidak didukung)</li> <li>• GR =&gt; Tp (tidak didukung)</li> </ul>
2	Wilopo (2017)	Independen : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rasio PAD (RP)</li> <li>• Ukuran Pemda (UP)</li> <li>• Kompleksitas pemerintahan (KP)</li> <li>• Belanja daerah (BD)</li> <li>• Rasio pembiayaan utang (RU)</li> <li>• Tingkat kesejahteraan masyarakat (TK)</li> <li>• Kualitas laporan keuangan (KL)</li> </ul> Dependen : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Transparansi (Tp)</li> <li>• Akuntabilitas (Ak)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kuantitatif</li> <li>• Seluruh Pemda yang diaudit oleh BPK TA 2013</li> <li>• Regresi berganda (SPSS)</li> <li>• teori keagenan, teori signal, dan teori <i>good publik governance</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TK=&gt; Tp (didukung)</li> <li>• TK =&gt; Ak (didukung)</li> <li>• RP =&gt; Tp (tidak didukung)</li> <li>• RP =&gt; Ak (tidak didukung)</li> <li>• UP =&gt; Tp (tidak didukung)</li> <li>• UP =&gt; Ak (tidak didukung)</li> <li>• KP =&gt; Tp (tidak didukung)</li> <li>• KP =&gt; Ak (tidak didukung)</li> <li>• BD =&gt; Tp (tidak didukung)</li> <li>• BD =&gt; Ak (tidak didukung)</li> <li>• RU =&gt; Tp (tidak didukung)</li> <li>• RU =&gt; Ak (tidak didukung)</li> <li>• KL =&gt; Tp (tidak didukung)</li> <li>• KL =&gt; Ak (tidak didukung)</li> </ul>

Tabel 2.1 Lanjutan

No	Peneliti	Variabel	Metode, Sampel, Alat Analisis, dan Teori	Hasil
3	Gunawan (2016)	Independen : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penerapan <i>e-Budgeting</i> (PeB)</li> </ul> Dependen : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Transparansi (Tp)</li> <li>• Akuntabilitas (Ak)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kualitatif</li> <li>• 20 SKPD Surabaya</li> <li>• Alat Analisis : -</li> <li>• Teori <i>Stewardship</i></li> </ul>	Penerapan E-Budgeting sudah dilakukan di berbagai tingkatan institusi di pemerintahan Surabaya dan yang melatar belakangi yaitu kualitas SDM dan hal ini membuat akuntabilitas dan transparansi berjalan dengan baik.
4	Trisnawati dan Achmad (2014)	Dependen : <ul style="list-style-type: none"> <li>• publikasi laporan keuangan pemerintah daerah melalui internet (PLkI)</li> </ul> Independen : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kompetisi politik (KP)</li> <li>• Ukuran Pemerintah Daerah (UP)</li> <li>• Rasio Pembiayaan Utang (RU)</li> <li>• Kekayaan Pemerintah Daerah (KD)</li> <li>• Tipe Pemerintah Daerah (TP)</li> <li>• Opini Audit (OA)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Metode Penelitian Kuantitatif</li> <li>• seluruh pemda di Indonesia pada Tahun 2012</li> <li>• Regresi berganda (SPSS)</li> <li>• teori keagenan, teori signal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KP =&gt; PLkI (didukung)</li> <li>• UP =&gt; PLkI (didukung)</li> <li>• RU =&gt; PLkI (didukung)</li> <li>• KD =&gt; PLkI (didukung)</li> <li>• TP =&gt; PLkI (didukung)</li> <li>• OA =&gt; PLkI (didukung)</li> </ul>

Tabel 2.1 Lanjutan

NO	Peneliti	Variabel	Metode, Sampel, Alat Analisis, dan Teori	Hasil
5	Istikomah dan Mutmainah (2017)	Dependen : <ul style="list-style-type: none"> <li>• publikasi laporan keuangan pemerintah daerah melalui internet (PLkI)</li> </ul> Independen : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Leverage (Lv)</li> <li>• Kekayaan Pemda (KP)</li> <li>• Opini Auditor (OA)</li> <li>• Rasio Tingkat Ketergantungan(RK)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kuantitatif</li> <li>• seluruh Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Pulau Jawa pada Tahun 2012 sampai 2014</li> <li>• Regresi berganda (SPSS)</li> <li>• teori keagenan, teori signal</li> </ul>	Lv => PLkI (tidak didukung) KP => PLkI (didukung) OA => PLkI (didukung) RK => PLkI (tidak didukung)
6	Latif dan Saadah (2019)	Dependen : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Akuntabilitas</li> <li>• Transparansi</li> </ul> Independen : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penerapan E-Governance</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kualitatif</li> <li>• <i>E-Government</i> kota Bandung</li> <li>• Alat Analisis : -</li> <li>• Teori : -</li> </ul>	<i>e-Government</i> di kota bandung sudah menunjukkan akuntabilitas dan transparansi nya akan tetapi masih perlu di kembangkan dan dilakukan beberapa perbaikan pada beberapa aspek.
7	Sa'adah (2015)	Dependen : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Akuntabilitas</li> <li>• Transparansi</li> </ul> Independen : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penerapan E-Governance</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kualitatif</li> <li>• <i>E-Government</i> Pemerintahan Kabupaten Blitar</li> <li>• Alat Analisis : -</li> <li>• Teori : -</li> </ul>	Akuntabilitas dan transparansi sudah dilakukan dengan baik namun sistem penganggaran masih dilakukan secara manual dan sistem penganggaran yang tertutup

				cenderung membuat celah penyimpangan.
8	Pina, Torres dan Royo (2009)	Dependen : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Akuntabilitas</li> <li>• Transparansi</li> </ul> Independen : Penerapan E-Governance	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kuantitatif</li> <li>• Regresi berganda (SPSS)</li> <li>• Teori Institusional</li> </ul>	<i>e-Government</i> dalam hal konten situs web yang terkait dengan dimensi transparansi, interaktivitas, kegunaan, dan kematangan web <i>e-Government</i> antara tahun 2004 dan 2007 menunjukkan peningkatan sekitar 20 persen. Hal ini mencerminkan kemajuan dalam <i>e-Government</i> dan perhatian pemerintah lokal Uni Eropa yang meningkat untuk membawa pemerintah lebih dekat dengan warga negara dan untuk memproyeksikan citra modernitas dan daya tanggap.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
 الجامعة الإسلامية  
 بالاسلام بالاندونيسيا

Transparansi dan akuntabilitas telah banyak diteliti. Terdapat beberapa penelitian yang menggunakan variabel transparansi dan akuntabilitas dengan menggunakan metode, sampel, alat ukur dan variabel independen yang berbeda beda. Pada penelitian sebelumnya menghasilkan hasil yang berbeda-beda, penelitian sebelumnya dilakukan oleh Adiputra *et al* (2018), Wilopo (2017), Gunawan (2016), Trisnawati dan Achmad (2014), Istikomah dan Mutmainah (2017), Latif dan Saadah (2019), Sa'adah (2015) dan Pina, Torres dan Royo (2009).

Dari Tabel 2.1 dapat dilihat bahwa penelitian terdahulu mengungkapkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan daerah. Adapun beragam variabel yang telah digunakan pada penelitian sebelumnya. Variabel yang sering digunakan yaitu Ukuran Pemerintah Daerah, Kualitas Laporan Keuangan, Penerapan *e-Government* dan Rasio Pembiayaan utang seperti pada Adiputra *et al* (2018), Utama dan Rossieta (2018), Wilopo (2017), Gunawan (2016), Trisnawati dan Achmad (2014), Istikomah dan Mutmainah (2017), Latif dan Saadah (2019), Sa'adah (2015) dan Pina, Torres dan Royo (2009).

Penelitian sebelumnya telah banyak menggunakan berbagai macam teori yang berbeda beda. Pada tabel di atas beberapa teori yang sering digunakan yaitu teori keagenan, teori legitimasi dan teori signal, beberapa teori tersebut telah digunakan oleh Adiputra, Utama dan Rossieta (2018), Wilopo (2017), Trisnawati dan Achmad (2014), Istikomah dan Mutmainah (2017), dan Pina, Torres dan Royo (2009). Adapun sampel yang digunakan yaitu pemerintah daerah yang ada di Indonesia. Metode penelitian yang paling sering digunakan yaitu pengambilan sampel kuantitatif dengan menggunakan alat analisis regresi berganda SPSS seperti yang

dilakukan oleh Adiputra, Utama dan Rossieta (2018), Wilopo (2017), Trisnawati dan Achmad (2014), Istikomah dan Mutmainah (2017).

Penelitian yang dilakukan oleh Adiputra, *et al.*, (2018) memberikan kesimpulan bahwa kualitas laporan keuangan melalui opini audit dan lingkungan politik berpengaruh positif signifikan terhadap transparansi pemerintah daerah di Indonesia. Di sisi lain, besar kecilnya pemerintah daerah dan tingkat respon pemerintah daerah terhadap regulasi tersebut tidak memengaruhi transparansi pemerintah daerah di Indonesia. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Trisnawati dan Achmad (2014) bahwa besar atau kecilnya pemda memengaruhi keterbukaan dan pemaparan informasi. Adapun hasil dari penelitian lainnya yaitu tingkat kesejahteraan masyarakat berpengaruh terhadap pengungkapan informasi melalui *website* (Wilopo, 2017).

## **2.8 Pengembangan Hipotesis**

### **2.8.1 Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Transparansi**

Sesuai dengan teori agensi yang membahas terkait hubungan antara prinsipal dan agen. Dalam penelitian sebelumnya, prinsipal memberikan amanah kepada agen untuk melakukan sebuah tugas untuk kepentingan prinsipal, dalam hal ini termasuk pendelegasian otorisasi pengambilan keputusan dari prinsipal kepada agen (Jensen, 1976). Oleh karena itu besarnya aset yang dikelola oleh pemerintah, maka timbul tuntutan masyarakat agar pemerintah melaporkan semua aktivitasnya. Dengan demikian masyarakat dapat mengidentifikasi kinerja pemerintah apakah sudah menjalankan sesuai dengan prosedurnya atau tidak dan tidak akan terjadi asimetri informasi.

Pemerintah daerah dituntut untuk melakukan keterbukaan informasi non keuangan dan keuangan serta dituntut untuk mempermudah akses yang dimiliki oleh masyarakat untuk mendapatkan informasi tersebut. Masyarakat sebagai pemegang kepentingan di pemerintah dan pemerintahan sebagai pemegang Amanah dari masyarakat melalui pemilihan umum harus memenuhi keinginan itu, oleh karena itu dengan bantuan internet pemerintah dapat mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dengan penerapan *e-Government*. Pemerintah daerah yang memiliki banyak akses akan berusaha untuk memanfaatkan seluruh asetnya untuk mengelola sebuah sistem *e-Government* yang diinginkan masyarakat sehingga terciptalah akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah.

Penelitian sebelumnya sudah membahas terkait Ukuran Pemerintah diukur dari nilai aset dan didapatkan hasil besar kecilnya pemerintah daerah tidak memengaruhi transparansi pemerintah daerah di Indonesia (Adiputra, 2018). Berbeda dengan Trisnawati (2014) yang menyatakan bahwa ukuran pemerintah daerah memengaruhi terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah. Dengan ketidakkonsistenan hasil pada penelitian sebelumnya maka penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut :

H1: Ukuran Pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap tingkat transparansi Pemerintah Daerah.

### **2.8.2 Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Akuntabilitas**

Sesuai dengan teori agensi yang membahas terkait hubungan antara prinsipal dan agen. Jensen (1976) menyampaikan prinsipal memberikan wewenang kepada agen untuk melakukan sebuah tugas untuk kepentingan prinsipal, hal ini termasuk

pendelegasian otorisasi pengambilan keputusan dari prinsipal kepada agen. Oleh karena itu besarnya aset yang dikelola oleh pemerintah, maka timbul tuntutan masyarakat agar pemerintah melaporkan semua aktivitasnya. Dengan demikian masyarakat dapat mengidentifikasi kinerja pemerintah apakah sudah menjalankan sesuai dengan prosedurnya atau tidak sehingga meminimalisir terjadi asimetri informasi.

Sebuah Pemerintah daerah yang berukuran besar memiliki jumlah dan transfer kekayaan yang besar, sehingga Pemerintah daerah tersebut akan mendapatkan pengawasan yang lebih ketat. Pemerintah daerah yang besar juga lebih kompleks dalam pengelolaan keuangannya, sehingga semakin banyak informasi keuangan yang harus dilaporkan untuk mengurangi terjadinya asimetri informasi. Trisnawati dan Achmad (2014) menyatakan ukuran sebuah pemerintah daerah akan memengaruhi tingkat pengawasan karena masyarakat akan melihat semua aktivitas yang dilakukan pemerintah daerah tersebut.

Wilopo (2017) menyatakan Ukuran Pemerintah diukur dari nilai aset bahwa Ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pemerintah daerah di Indonesia (Adiputra, 2018). Hal ini tidak sejalan dengan Trisnawati (2014), menyatakan bahwa ukuran pemerintah daerah memengaruhi terwujudnya akuntabilitas pemerintah daerah. Penelitian ini akan memastikan perbedaan hasil penelitian tersebut dengan mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H2: Ukuran Pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap tingkat akuntabilitas pemerintah Daerah.

### **2.8.3 Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Transparansi**

Teori legitimasi menjadi teori yang melandasi pemerintah daerah untuk patuh terhadap aturan tercermin dalam laporan keuangan yang tersusun sesuai standar. Hal ini memungkinkan memberikan pengaruh terhadap penerapan prinsip transparan. Dengan tersusunnya laporan keuangan dengan kualitas baik maka memberikan anggapan pemerintah memiliki kinerja optimal sehingga memberikan dampak peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin daerah tersebut. Kegiatan organisasi harus sesuai dengan nilai-nilai sosial lingkungan untuk mendapatkan dukungan legitimasi kegiatan organisasi (Dowling & Pfeffer, 1975). Tuntutan masyarakat terhadap organisasi sektor publik untuk meningkatkan kualitas, profesionalisme, dan akuntabilitas publik dalam pelaksanaan program-program dengan memberikan dorongan dilakukannya pemeriksaan yang tidak hanya sebatas kepatuhan tetapi juga kinerja.

Secara umum pengukuran kualitas dari pelaporan dan pengungkapan pada sektor pemerintah adalah *GFOA's Certificate of Achievement program*. Di Indonesia hal seperti ini dapat digolongkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang dianugerahkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan PEMDA (Wilopo, 2017). Semakin baik kualitas laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah maka akan berpengaruh terhadap tingkat transparansi. Dengan kualitas yang baik tingkat informasi yang disajikan kepada semakin banyak dan mudah diakses sehingga dapat meningkatkan publik dengan pemerintah daerah tersebut.

Pada penelitian sebelumnya ditemukan hasil Kualitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap transparansi pada pemerintah daerah (Wilopo, 2017). Akan tetapi hal sebaliknya diungkapkan oleh Adiputra, (2018) yang menyatakan kualitas laporan keuangan dapat memengaruhi transparansi pada pemerintah daerah yang ada di Indonesia. Karena terjadinya perbedaan hasil pada penelitian ini ingin memastikan bagaimana pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas dan transparansi pemerintah. Hipotesis yang diajukan pada penelitian ini yaitu:

H3: Kualitas Laporan Keuangan berpengaruh positif terhadap tingkat transparansi Pemerintah Daerah.

#### **2.8.4 Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Akuntabilitas**

Teori legitimasi dapat melandasi pemerintah daerah untuk patuh terhadap aturan yang dimana tercermin dalam laporan keuangan yang tersusun sesuai standar dan akan memengaruhi akuntabilitas. Kegiatan organisasi harus sesuai dengan nilai-nilai sosial lingkungan dan untuk mendapatkan dukungan legitimasi kegiatan organisasi (Dowling & Pfeffer, 1975). Tuntutan publik terhadap organisasi sektor publik untuk meningkatkan kualitas, profesionalisme, dan akuntabilitas publik dalam pelaksanaannya program-programnya mendorong dilakukannya pemeriksaan yang tidak hanya sebatas kepatuhan tetapi juga kinerja.

Kualitas Laporan Keuangan juga dapat mempengaruhi Akuntabilitas pemerintah daerah. Laporan keuangan yang baik dan mendapatkan opini WTP dari BPK mengindikasikan pengungkapan yang telah dilakukan sudah sesuai. Oleh sebab itu ketika kualitas laporan keuangan suatu pemerintah baik maka bisa jadi tingkat akuntabilitas dari pemerintah daerah tersebut juga baik.

Trisnawati (2014) menyatakan kualitas laporan keuangan yang ditinjau dari Opini Audit tidak berpengaruh terhadap transparansi pada pemerintah daerah. Berbeda dengan Istikomah (2017) menyatakan kualitas laporan keuangan dapat memengaruhi akuntabilitas pada pemerintah daerah yang ada di Indonesia. Karena terjadinya perbedaan hasil pada penelitian ini ingin memastikan bagaimana pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pemerintah. Penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H4: Kualitas Laporan Keuangan berpengaruh positif terhadap tingkat akuntabilitas pemerintah Daerah.

#### **2.8.5 Pengaruh Kematangan *e-Government* Pemerintah Daerah terhadap Transparansi**

Sejalan dengan Teori Agensi yang menyatakan pemerintah dituntut untuk memenuhi keinginan masyarakat yang memberikan amanah kepada pemimpin daerah melalui pemilihan umum. Oleh karena itu masyarakat berhak menuntut kinerja yang optimal dari pemerintah. Masyarakat menginginkan pelaporan dan keterbukaan informasinya, hal ini menyebabkan mau tidak mau pemerintah harus memenuhi keinginan tersebut dengan meningkatkan kualitas dan pelayanan *e-Government*.

Pada saat ini pemerintah daerah berlomba lomba meningkatkan sistem informasi pemerintahan yang diharapkan dapat memenuhi keinginan masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan adanya sistem ini masyarakat mudah mendapatkan informasi pemerintah daerah. Oleh sebab itu semakin matangnya *e-Government* maka dapat berpengaruh meningkatnya tingkat

transparansi dengan adanya teknologi yang memfasilitasi. Penerapan *e-Government* mendukung peningkatan terhadap penyajian informasi aktifitas pemerintah daerah dapat berpengaruh terhadap transparansi (Gunawan & Rizky, 2016). Hal ini sejalan dengan Latif dan Saadah, (2019) yaitu kematangan sebuah *e-Government* mempengaruhi tingkat Transparansi yang dilakukan pemerintah daerah. Oleh sebab itu penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H5: Kematangan *e-Government* berpengaruh positif terhadap tingkat transparansi Pemerintah Daerah.

#### **2.8.6 Pengaruh Kematangan *e-Government* Pemerintah Daerah terhadap Akuntabilitas**

Teori Agensi menyatakan bahwa pemerintah diminta memenuhi keinginan masyarakat yang memberikan amanah. Oleh sebab itu masyarakat berhak menuntut kinerja yang baik dari pemerintah dan mau tidak mau pemerintah harus memenuhi hal tersebut dengan meningkatkan kualitas dan pelayanan *e-Government*.

Pemaparan informasi aktifitas keuangan dan non keuangan merupakan kewajiban dari Pemerintah daerah. Pemaparan informasi keuangan dan non keuangan pun membutuhkan sebuah wadah untuk mempublikasikan. Oleh sebab itu *e-Government* pemerintah daerah diharapkan dapat memfasilitasi pemaparan informasi aktifitas pemerintah daerah. Semakin matangnya *e-Government* bisa jadi alat yang mempermudah untuk melakukan akuntabilitas.

Latif dan Saadah (2019) menyatakan kematangan sebuah *e-Government* mempengaruhi tingkat Akuntabilitas yang dilakukan pemerintah daerah, hal ini terjadi karena, semakin matangnya sebuah *e-Government* memberikan kemudahan

dalam pemaparan sebuah informasi kepada masyarakat. Gunawan (2016) mengungkapkan penerapan *e-Government* dapat berpengaruh terhadap Akuntabilitas publik. Oleh sebab itu penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut:

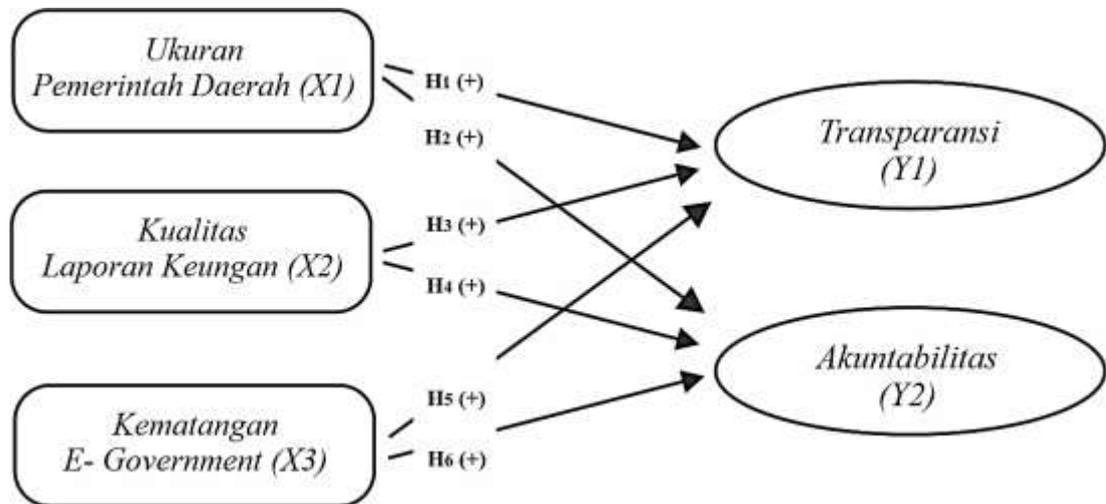
H6: Kematangan *e-Government* berpengaruh positif terhadap tingkat akuntabilitas Pemerintah Daerah

## 2.9 Kerangka Penelitian

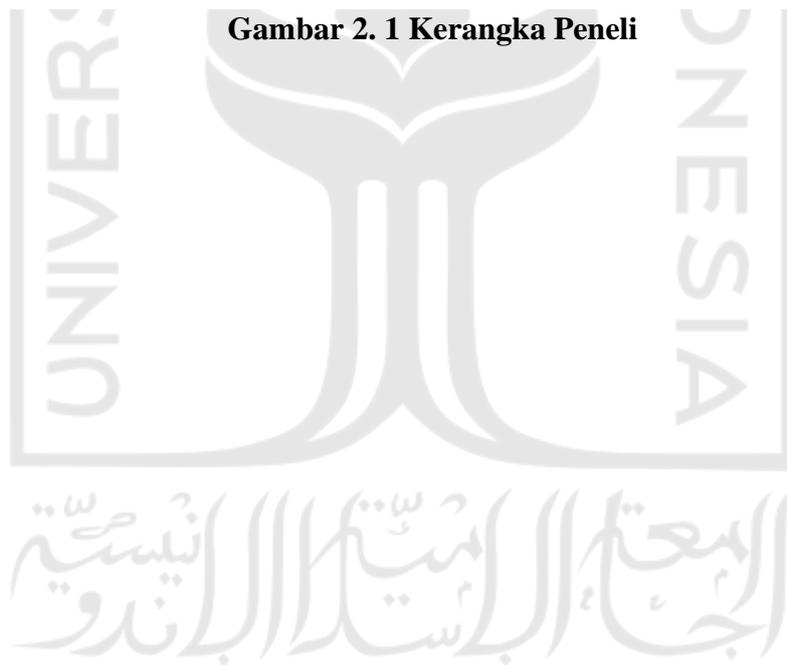
Kerangka konseptual menjadi penjelasan sebuah konsep dari penelitian. Konsep penelitian ini menjawab semua rumusan masalah. Kerangka ini akan menjelaskan sebuah arah konsep penelitian untuk meninjau kesinambungan antar beberapa variabel. Kerangka ini akan di visualkan pada Gambar 2.1.

Pemerintah yang baik merupakan pemerintahan yang memiliki *governance* yang baik seperti yang dijelaskan dalam Teori *Good Governance*. Teori tersebut terdapat beberapa prinsip di dalamnya yaitu transparansi dan akuntabilitas. Sebagai penyelenggara pemerintahan tentu saja pemerintah di tuntut untuk melakukan *Governance* yang baik sesuai dengan teori agensi yang dimana pemerintah sebagai agen dan masyarakat sebagai *principal*. Teori legitimasi juga menjelaskan jika ingin kepemimpinannya diakui maka pemerintah harus menjalankan apa yang diinginkan oleh masyarakat, transparansi dan akuntabilitas menjadi beberapa keinginan yang diinginkan masyarakat oleh karena itu pemerintah harus bisa mewujudkan dua

prinsip tersebut yang mana prinsip itu terwujud akan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti yang terdapat pada Gambar 2.1.



Gambar 2. 1 Kerangka Peneli



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Metodologi Penelitian**

Metode yang digunakan yaitu metode kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Data tersebut berasal dari data yang didapatkan dari laporan keuangan maupun *website* pemerintah daerah. Variabel dependen yang digunakan adalah Akuntabilitas dan Transparansi. Variabel independen yang digunakan yaitu ukuran pemerintah daerah, kualitas laporan keuangan dan kematangan *e-Government*.

#### **3.2 Populasi dan Sampel**

Pengujian akan dilakukan terhadap akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah yang ada di Indonesia. Oleh karena itu mengambil data 541 Pemerintah daerah baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Indonesia, dengan kriteria pemerintah daerah yang telah mengimplementasikan *e-Government* berupa adanya *website* resmi. Adapun kriteria lain yaitu pemerintah provinsi yang memiliki Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Tahun anggaran 2020 yang telah di audit oleh BPK dan mendapatkan opini dari BPK.

#### **3.3 Teknik dan Metode Pengumpulan Data**

Teknik Pengumpulan data yang digunakan yaitu menggunakan data sekunder yang didapatkan melalui keterbukaan informasi di dalam *website* resmi pemerintah daerah pada Tahun 2021. Data-data yang akan diambil dari situs *website* resmi pemerintah daerah tersebut adalah ukuran pemerintah daerah serta laporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu akan diambil hasil dari pemeriksaan dari laporan keuangan anggaran 2020 oleh BPK RI. Pengujian juga dilakukan untuk

menganalisis seberapa mudahnya *website* pemerintah daerah diakses, menganalisis seberapa lengkapnya pengukuran yang dilakukan dan menganalisis seberapa mapannya *website* ini dikembangkan.

### **3.4 Pengukuran Variabel dan Definisi Variabel Operasional**

Pada Penelitian Ini memiliki 2 variabel dependen yaitu akuntabilitas dan transparansi dan Variabel Independen yang akan diteliti pada penelitian ini adalah *Size of Local Government* (Ukuran Pemerintah), *Quality of Local Financial Statements* (Kualitas Laporan keuangan), *Maturity of e-Government* (Kematangan *e-Government*). Tiga variabel tersebut yang menjadi faktor yang melatarbelakangi terciptanya akuntabilitas dan transparansi yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

#### **3.4.1 Akuntabilitas**

Akuntabilitas merupakan sebuah kewajiban seorang agen untuk memberikan pemaparan, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktifitas, serta kegiatan yang menjadi keharusan tanggungjawab kepada masyarakat. Pada hal ini masyarakat memiliki hak serta kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban kepada para *principal*. Adapun beberapa faktor yang akan diukur tertuang pada Tabel 3.1.

**Tabel 3. 1 Indikator Akuntabilitas**

No	Indikator	Point	Referensi
1	Penilaian Akuntabilitas oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) dengan <b>mendapatkan Rating AA</b>	4	Dwi, Harpanto, & Fahrizal, (2015)
2	Tersedianya Pelaporan kinerja Penilaian Akuntabilitas oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) dengan <b>mendapatkan Rating BB - A</b>	3	
3	Tersedianya Pelaporan kinerja Penilaian Akuntabilitas oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) dengan <b>mendapatkan Rating CC - B</b>	2	
4	Tersedianya Pelaporan kinerja Penilaian Akuntabilitas oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) dengan <b>mendapatkan Rating D - C</b>	1	
Skor Minimal 1 dan Skor Maksimal 4			

### 3.4.2 Transparansi

Variabel dependen yang selanjutnya yang akan diteliti yaitu transparansi yang dimana transparansi adalah kemudahan keterbukaan informasi pemerintah terhadap segala aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Adapun indikator yang diukur tertuang pada Tabel 3.2.

**Tabel 3. 2 Indikator Transparansi**

No	Indikator	Point	Referensi
1	Jika website pemerintah daerah dapat ditemukan di halaman pertama pencarian di google dengan mengetikkan nama pemerintah daerah.	+1	Adiputra <i>et al</i> (2018)
2	hanya tiga klik atau kurang yang diperlukan untuk melihat informasi keuangan dan non keuangan di situs web pemerintah daerah.	+1	
3	jika data keuangan dan non keuangan dapat diunduh dalam berbagai format.	+1	
4	jika ada informasi keuangan dan non-keuangan sebelumnya situs web pemerintah.	+1	
Skor Minimal 1 dan Skor Maksimal 4			

### 3.4.3 Ukuran Pemerintah Daerah

Ukuran Pemerintahan akan menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi akuntabilitas dan transparansi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Hal ini terjadi dikarenakan semakin besarnya ukuran atau aset yang dimiliki pemerintah, maka tuntutan masyarakat akan semakin tinggi untuk mengidentifikasi pengelolaan dana dan keterbukaan informasi aktifitas pemerintahan. Pada variabel ini melihat seberapa besar aset yang dimiliki pemerintah daerah seperti yang dilakukan oleh Adiputra *et al* (2018). Adapun indikator dari Ukuran Pemerintah daerah tertuang pada Tabel 3.3.

**Tabel 3. 3 Indikator Ukuran Pemerintah Daerah**

1	Total aset yang dimiliki Pemerintah Daerah yang terdapat dalam Neraca LKPD. <b>Total Aset = Aset Tetap</b>	Adiputra <i>et al</i> (2018)
---	--	------------------------------

	+ Aset Lancar +Investasi Jangka Panjang + Aset Lainnya	
--	--	--

#### 3.4.4 Kualitas Laporan Keuangan

Semakin baik dan sesuai laporan keuangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah maka laporan tersebut akan cenderung dipublikasikan dan dapat diakses dengan mudah. Hal ini dapat menarik kepercayaan dari masyarakat sebagai *principal*. Kualitas laporan diukur melalui opini yang diberikan BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah Tahun anggaran 2020. Adapun opini audit yang dimaksud yaitu WTP, WDP, TW (Adiputra *et al.*, 2018). Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) berarti tidak terjadi kesalahan yang bersifat material sehingga hal ini akan dianggap baik dalam pengelolaan pemerintahan oleh masyarakat. Opini lainnya seperti WDP (Wajar Dengan Pengecualian) berarti dimungkinkan masih terdapat kesalahan yang bersifat material, selain itu opini TW (Tidak Wajar) juga memiliki kesalahan yang bersifat material dan tidak dapat ditoleransi, sehingga menimbulkan anggapan buruk dari masyarakat dalam pengelolaan pemerintahan.

**Tabel 3. 4 Indikator Kualitas Laporan Keuangan**

No	Indikator	Point	Referensi
1	Opini BPK WTP	1	Adiputra <i>et al</i> (2018)
2	Opini BPK Non-WTP	0	

#### 3.4.5 Kematangan *e-Government*

Kematangan *e-Government* merupakan salah satu faktor pendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi. Hal ini dapat terjadi karena dengan semakin matang dan mapannya *e-Government* yang dimiliki oleh pemerintah akan

menjadi fasilitas untuk pemerintah memaparkan hasil kinerja secara terbuka serta mudah diakses oleh masyarakat luas. Pengukuran variabel ini terdiri dari beberapa aspek yang tertuang dalam Tabel 3.5.

**Tabel 3. 5 Indikator Kematangan *e-Government***

No	Indikator	Point	Referensi
1	Adanya Kegunaan Katalog pada Website	+1	Fietkiewicz, <i>et al</i> (2017)
2	Adanya Kegunaan Komunikasi pada Website	+1	
3	Adanya Kegunaan transaksi pada Website	+1	
4	Adanya Kegunaan Interoperabilitas (integrasi) pada Website	+1	
5	Adanya Kegunaan Partisipasi pada Website	+1	

### 3.5 Uji Statistik

Uji statistik penelitian ini dilakukan menggunakan analisis meliputi analisis statistik deskriptif dengan tujuan guna memberikan gambaran penelitian. Pada penelitian ini menggunakan analisis pengujian PLS-SEM. Pada pengujian ini akan melakukan uji struktural model (*Inner Model*) selanjutnya menguji *Model fit* dan Uji Hipotesis.

#### 3.5.1 Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran suatu data dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varians, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (distribusi miring). Oleh karena itu, statistik deskriptif meliputi penyajian data melalui tabel, diagram lingkaran, grafik, nilai maksimum, nilai minimum, perhitungan rata-rata (mean), dan standar deviasi (Ghozali, 2018).

### **3.5.2 Metode Analisis *Structural Equation Modeling* (SEM)**

Pada Penelitian ini menggunakan metode analisis yaitu metode Analisis Structural Modeling (SEM). Metoda SEM merupakan sebuah teknik analisis yang pada dasarnya gabungan dari 2 metodologi disiplin ilmu yaitu perspektif ekonometrika yang berfokus pada prediksi dan psychometrika yang mampu menggambarkan konsep model dengan variabel laten (variabel yang tidak dapat di ukur langsung) namun dapat diukur menggunakan indikator indikator (Ghozali & Latan, 2014). SEM merupakan salah satu teknik analisis statistik canggih yang paling berguna yang telah muncul dalam ilmu sosial dalam beberapa dekade terakhir. SEM adalah kelas teknik multivariat yang menggabungkan aspek analisis faktor dan regresi, memungkinkan peneliti untuk secara bersamaan menguji hubungan antara variabel terukur dan variabel laten serta antara variabel laten (Gio, *et al.*, 2019).

### **3.5.3 *Partial Least Square* (PLS)**

Uji *Partial Least Square* atau sering disebut PLS merupakan sebuah metode analisis yang *powerful* dan sering disebut sebagai *Soft Modeling*. Hal ini dikarenakan dalam PLS meniadakan asumsi-asumsi OLS (*Ordinary Least Square*) regresi seperti distribusi normal dari sebuah data secara *multivariate* dan juga menghilangkan masalah multikolonieritas antar variabel. PLS tidak hanya digunakan untuk mengukur hubungan antar variabel, namun juga dapat menguji sebuah teori (Ghozali & Latan, 2014). PLS-SEM dapat digunakan untuk prediksi dan eksplorasi dalam model kompleks dengan ekspektasi santai pada data. PLS-SEM berguna dalam mengidentifikasi hubungan antar konstruksi. PLS-SEM adalah pengujian non-parametrik, pendekatan multivariat berdasarkan regresi OLS berulang untuk

memperkirakan model dengan variabel laten dan hubungan langsungnya. Konstruksi laten tidak dapat diamati secara langsung tetapi dapat diukur secara tidak langsung melalui beberapa indikator. Model PLS-SEM terdiri dari dua komponen utama, yaitu model struktural atau *Inner Model* dan model pengukuran atau *outer model* (Gio, et al., 2019).

### **3.6 Analisa Model Struktural (*Inner Model*)**

Inner Mode merupakan sebuah model struktural yang berfungsi untuk memprediksi hubungan sebab akibat dari variabel laten atau variabel yang tidak dapat diukur secara langsung. Pada pengujian ini membutuhkan bantuan prosedur bootstrapping dalam SMART PLS. Uji Struktural model digunakan untuk menguji hubungan antar konstruk laten. Ada beberapa pengujian model struktural yaitu *R-Square* pada konstruk endogen (Sekaran & Bouqie, 2016). Selain *R-Square* akan di ujinya *Q-Square* yang berguna untuk mempresentasikan synthesis dari cross validation. Pengujian selajutnya yaitu uji t atau uji signifikansi (Ghozali & Latan, 2014).

#### **3.7.1 *R-Square* ( $R^2$ )**

Evaluasi Model Struktural (*Inner Model*) dalam menilai sebuah model struktural dengan menggunakan PLS, dimulai dari melihat nilai *R-Squares* setiap variabel laten sebagai kekuatan prediksi dari model struktural. Interpretasinya sama dengan interpretasi pada OLS regresi. Perubahan dari nilai *R-Squares* digunakan untuk memberikan penjelasan pengaruh antar variabel laten endogen apakah mempunyai pengaruh yang *substantive*. Besaran nilai *R-Squares* seperti 0.75, 0.50 dan 0.25 dapat diambil kesimpulan bahwa model kuat, *moderate* dan lemah. Hasil dari PLS

*R-Squares* merepresentasi jumlah *variance* dari konstruk yang dijelaskan oleh model (Ghozali & Latan, 2014).

### **3.7.2 *Q-Square (Q<sup>2</sup>) Predictive Relevance***

Pada penelitian ini selain melihat besaran dari nilai *R-Squares*, evaluasi model PLS dapat juga dilakukan dengan *Q<sup>2</sup> Predictive Relevance* atau sering disebut *predictive sample reuse* yang dikembangkan oleh Stone (1974) dan Geisser (1975). Teknik ini dapat merepresentasi *synthesis* dari *cross-validation* dan fungsi *fitting* dengan prediksi dari *observed* variabel estimasi dari parameter konstruk. (Ghozali & Latan, 2014). Apabila dalam pengujian ini menunjukkan nilai  $Q^2 > 0$  maka dapat disimpulkan model mempunyai *Predictive Relevance*. Namun apabila nilai dari  $Q^2 < 0$  maka kurang memiliki *Predictive Relevance*. Jika *Q<sup>2</sup> Predictive Relevance* 0.02, 0.15 dan 0.35 menunjukkan bahwa model lemah, *moderate*, dan kuat (Ghozali & Latan, 2014).

### **3.7.3 Uji Signifikansi**

Menilai signifikansi pengaruh antar variabel, penting untuk dilakukan langkah *bootstrap*. tahapan *bootstrap* menggunakan semua sampel asli untuk pengambilan sampel ulang. Jumlah sampel yang dibutuhkan saat melakukan tahapan *bootstrap* sejumlah 200-1000 sampel sudah cukup untuk mengoreksi estimasi kesalahan standar PLS (Latan & Ghozali, 2014). Pada metode *resampling bootstrap*, nilai signifikansi yang digunakan (*two-tailed*) *t-values* adalah 1,65 (tingkat signifikan = 10%), 1,96 (tingkat signifikan = 5%) dan 2,58 (tingkat signifikan = 1%). Penelitian ini menggunakan taraf signifikansi 10% dengan nilai *t*-hitung sebesar 1,65.

### 3.8 Model Fit

Penelitian ini menggunakan *standardized root mean square residual (SRMR)* untuk melakukan pengukuran dalam model fit. SRMR diartikan sebagai perbedaan antara korelasi yang diamati dan matriks korelasi tersirat model. Hal ini memungkinkan untuk memberikan penilaian dari besarnya rata-rata perbedaan antara korelasi yang diamati dan korelasi yang diharapkan untuk model fit. Nilai dari SRMR kurang dari 0,10 atau 0,08 dianggap cocok. Hal ini menandakan model fit dianggap baik. SRMR diperkenalkan oleh Henseler, *et al* (2014) sebagai ukuran *goodness of fit* untuk PLS-SEM yang dapat digunakan untuk menghindari kesalahan spesifikasi model.

### 3.9 Uji Hipotesis

Pada Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Analisis regresi linier berganda berfungsi untuk menguji pengaruh dari beberapa variabel bebas terhadap satu variabel terikat (Ghozali, 2018). Dalam pengujianya PLS dapat digunakan untuk menguji model regresi berganda menggunakan variabel *observed*. Metode estimasi OLS (*Ordinary Least Square*) mensyaratkan terpenuhinya asumsi klasik linier agar memberikan hasil estimasi yang BLUE (*Best Linier Unbiased Estimed*). Apabila sampel data kecil maka adanya *missing value* dan terdapat problem multikolonieritas maka hasil estimasi OLS menjadi tidak stabil sehingga mengakibatkan meningkatnya standard error dan koefisien yang diestimasi. Namun dari masalah tersebut analisis regresi berganda menggunakan PLS dapat mengatasi masalah tersebut (Ghozali & Latan, 2014). Analisis regresi berganda menggunakan PLS tidak diperlukan melakukan uji pengukuran model untuk menguji validitas

serta realibilitas sehingga langsung dilakukan estimasi model struktural. Oleh sebab itu persamaan regresinya menjadi:

$$Y_1 = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

$$Y_2 = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

$Y_1$  = Transparansi

$Y_2$  = Akuntabilitas

$\alpha$  = Konstanta

$\beta_1$  = Koefisien regresi variabel Ukuran Pemerintah Daerah

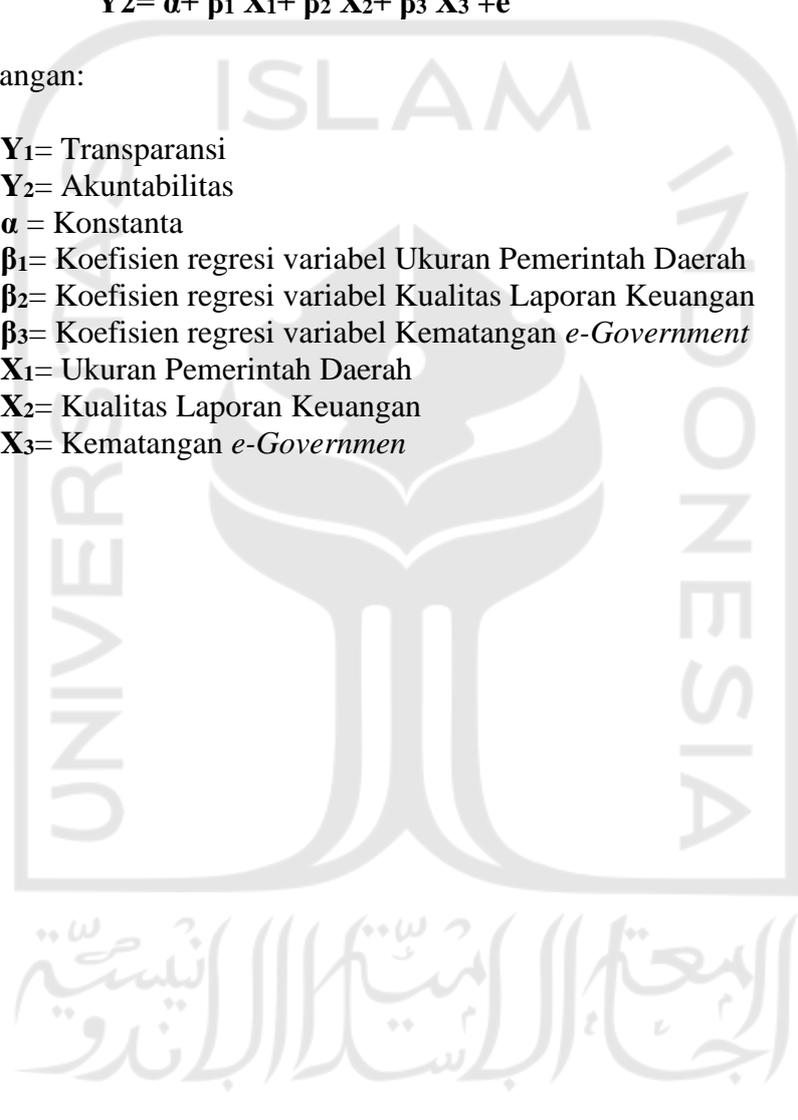
$\beta_2$  = Koefisien regresi variabel Kualitas Laporan Keuangan

$\beta_3$  = Koefisien regresi variabel Kematangan *e-Government*

$X_1$  = Ukuran Pemerintah Daerah

$X_2$  = Kualitas Laporan Keuangan

$X_3$  = Kematangan *e-Governmen*



## BAB IV

### HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

Dalam Bab ini akan membahas terkait hasil dan analisis penelitian berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi transparansi dan akuntabilitas pada pemerintah daerah di Indonesia dengan studi kasus pada pemerintah daerah ditingkat kabupaten/kota dan provinsi.

#### 4.1 Deskripsi Hasil Pengumpulan data

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Data diperoleh dari data yang sudah ada di website serta laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Data yang diperoleh yaitu sejumlah 541 pemerintah daerah yang terdiri dari pemerintah kabupaten/kota dan provinsi. Data ini berupa data keuangan dan data non keuangan. Adapun persebaran data tingkat pemerintahan yang didapat disajikan dalam Tabel 4.1.

**Tabel 4. 1 Tingkat Pemerintah Daerah**

No	Tingkat Pemerintahan	Jumlah	Persentase (%)
1	Provinsi	34	6.28
2	Kota	93	17.2
3	Kabupaten	414	76.52
<b>Total</b>		<b>541</b>	<b>100</b>

Sumber: Data Sekunder diambil 2022

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa data yang diambil mayoritas berasal dari pemerintah daerah tingkat kabupaten dengan jumlah 414 kabupaten (76.52%) dan data lainnya pada tingkat pemerintah kota terdapat 93 kota (17.2%) serta tingkat

provinsi berjumlah 34 provinsi (6.28%). Dapat dikatakan data-data ini akan mewakili data pemerintah dari beberapa tingkatan.

Dari data yang diambil berikut statistik deskriptif dari persebarannya pada Tabel 4.2.

**Tabel 4. 2 Deskriptif Data**

	<i>Mean</i>	<i>Median</i>	<i>Min</i>	<i>Max</i>	<i>Standard Deviation</i>
Ukuran Pemerintah Daerah (X1)	5,204,278	2,493,716	769,706	517,155,089	22,758,260.3
Kualitas Laporan Keuangan (X2)	0.896	1	0	1	0.305
Kematangan e-Government (X3)	2.146	2	1	3	0.563
Transparansi (Y1)	2.05	2	2	3	0.218
Akuntabilitas (Y2)	2.059	2	1	4	0.513

Sumber: Data Sekunder diambil 2022

Dari data pada tabel diatas dapat disimpulkan deskriptif dari setiap variabel sebagai berikut:

1. Variabel Ukuran pemerintah daerah menunjukkan nilai median atau nilai tengah dari variabel ini sebesar 2,493,716. Selain itu nilai rata-rata yang didapat sebesar 5,204,278. Pemerintah daerah memiliki ukuran yang berbeda ditinjau dari segi aset, dari hasil pengujian aset terkecil yang dimiliki pemerintah daerah sebesar 769,706 dan aset terbesarnya yaitu 517,155,089. Dari hasil ini menandakan bahwa di Indonesia ukuran pemerintah daerah sangat beragam. Dari data diatas tingkat sebaran dari variabel ukuran pemerintah dilihat dari standard deviasi sebesar 22,758,260.3.
2. Variabel Kualitas Laporan Keuangan menunjukkan nilai median atau nilai tengah dari variabel ini sebesar 1. Selain itu nilai rata-rata yang didapat sebesar 0.896.

Kualitas Laporan Keuangan dilihat dari sisi Opini Audit BPK setiap daerah memiliki hasil yang berbeda-beda, terlihat ada pemerintah daerah yang mendapat poin 1 yang artinya mendapat opini WTP dan poin 0 untuk selain opini WTP. Dari hasil ini menandakan bahwa opini atas laporan keuangan pemerintah daerah ada yang sudah baik dan ada yang masih perlu ditingkatkan. Dari data diatas tingkat sebaran dari kualitas laporan keuangan dilihat dari standard deviasi sebesar 0.305.

3. Variabel kematangan *e-Government* menunjukkan nilai median atau nilai tengah dari variabel ini sebesar 2. Selain itu nilai rata-rata yang didapat sebesar 2.146. kematangan *e-Government* pada pemerintah daerah sangat beragam ada yang sudah baik dalam penerapannya dan ada yang masih belum optimal, terlihat ada pemerintah daerah yang mendapat poin 3 untuk nilai tertinggi dan 1 untuk nilai terendah. Dari data diatas tingkat sebaran dari kematangan *e-Government* dilihat dari standard deviasi sebesar 0.563.
4. Variabel Transparansi menunjukkan nilai median atau nilai tengah dari variabel ini sebesar 2. Selain itu nilai rata-rata yang didapat sebesar 2.05. Tingkat Transparansi pada pemerintah daerah sangat beragam ada yang sudah memberikan kemudahan akses informasi keuangan maupun non keuangan dan ada yang masih belum optimal dalam memberikan aksesibilitas informasi, terlihat ada pemerintah daerah yang mendapat poin 3 untuk nilai tertinggi dan 1 untuk nilai terendah. Dari data diatas tingkat sebaran dari Transparansi dilihat dari standard deviasi sebesar 0.218.

5. Variabel Akuntabilitas menunjukkan nilai median atau nilai tengah dari variabel ini sebesar 2. Selain itu nilai rata-rata yang didapat sebesar 2.059. Tingkat Akuntabilitas pada pemerintah daerah sangat beragam ada yang sudah memberikan baik sistem akuntabilitasnya ada juga yang masih rendah dalam penerapan akuntabilitas, terlihat ada pemerintah daerah yang mendapat poin 4 untuk nilai tertinggi dan 1 untuk nilai terendah. Dari data diatas tingkat sebaran dari Transparansi dilihat dari standard deviasi sebesar 0.513.

#### 4.2 Analisis Model Struktural

Sebelum uji Hipotesis dilakukan, peneliti melakukan evaluasi terhadap model struktural menggunakan pengujian *R-Square* dan stone geiser *Q-Square*. Pada Tabel 4.3 menggambarkan hasil Uji *R-Square*.

**Tabel 4. 3 Analisis *R-Square***

	<i>R-Square</i>
<b>Akuntabilitas (Y2)</b>	0.147
<b>Transparansi (Y1)</b>	0.101

Sumber: Hasil Olah Data 2022

Berdasarkan tabel di atas, diketahui hasil sebagai berikut:

1. Nilai *R-Square* dari Akuntabilitas Sebesar 0.147. Hal ini menandakan bahwa variabilitas Akuntabilitas dapat dijelaskan oleh variabilitas variabel eksogen pada penelitian ini memperoleh prosentase sebesar 14.7% sedangkan 85.3% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian ini.
2. Nilai *R-Square* dari Transparansi Sebesar 0.101. Hal ini menandakan bahwa variabilitas Transparansi dapat dijelaskan oleh variabilitas variabel eksogen pada penelitian ini memperoleh prosentase sebesar 10.1% sedangkan 89.9% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian ini.

Setelah dilakukan Uji *R-Square* maka pengujian selanjutnya yaitu *Q-Square*, hasil dari pengujian ini dapat dilihat pada Tabel 4.4.

**Tabel 4. 4 Analisis *Q-Square***

	<i>Q-Square</i>
<b>Akuntabilitas (Y2)</b>	0.142
<b>Transparansi (Y1)</b>	0.093

Sumber: Hasil Olah Data 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui sebagai berikut:

1. Nilai *Q-Square* dari Akuntabilitas yang didapat dari proses pengujian didapat hasil sebesar 0.142 atau  $Q^2 > 0$ , oleh sebab itu didapatkan kesimpulan bahwa model memiliki *Predictive Relevance*.
2. Nilai *Q-Square* dari Akuntabilitas yang didapat dari proses pengujian didapat hasil sebesar 0.093 atau  $Q^2 > 0$ , oleh sebab itu didapatkan kesimpulan bahwa model memiliki *Predictive Relevance*.

Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa model ini dianggap baik dan dapat menjelaskan informasi yang ada dalam data yang ada data penelitian sebesar 14,2% dan 9,3%.

#### **4.3 Model Fit**

Berdasarkan hasil pengolahan menggunakan aplikasi SmartPls didapatkan hasil nilai SRMR sebesar 0.052. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai SRMR lebih kecil dari 0.10, hal ini menandakan bahwa model pada penelitian ini dapat dikategorikan memiliki model fit yang baik sehingga model ini dapat terhindar dari kesalahan spesifikasi sebuah model dan model ini layak untuk diuji pengaruhnya.

#### 4.4 Pengujian Hipotesis

Sebuah Hipotesis dapat disimpulkan diterima atau ditolak dengan melihat nilai signifikansi antar hubungan, *t* statistik dan *P Value*. Oleh sebab itu estimasi dari pengukuran dan standard error tidak dihitung dengan asumsi statistik, melainkan didasarkan observasi empiris. Dengan menggunakan metoda *bootstrapping*, maka hipotesis dapat diterima apabila ilai signifikansi *p-value* < 0.05 dan jika ditolak *p-value* > 0.05. Hasil dari pengujian hipotesis dapat dilihat pada Tabel 4.5.

**Tabel 4. 5 Hasil Uji Hipotesis**

Deskripsi	<i>Original Sample (O)</i>	<i>T Statistics</i>	<i>P Values</i>	Keterangan
H <sub>1</sub> : Ukuran Pemerintah Daerah (X1) -> Transparansi (Y1)	0.257	3.285	0.000	Didukung
H <sub>2</sub> : Ukuran Pemerintah Daerah (X1) -> Akuntabilitas (Y2)	0.110	3.820	0.023	Didukung
H <sub>3</sub> : Kualitas Laporan Keuangan (X2) -> Transparansi (Y1)	0.046	2.698	0.007	Didukung
H <sub>4</sub> : Kualitas Laporan Keuangan (X2) -> Akuntabilitas (Y2)	0.266	5.887	0.000	Didukung
H <sub>5</sub> : Kematangan <i>e-Government</i> -> Transparansi (Y1)	0.151	3.240	0.001	Didukung
H <sub>6</sub> : Kematangan <i>e-Government</i> -> Akuntabilitas (Y2)	0.204	5.651	0.000	Didukung

Sumber: Hasil Olah Data 2022

Berdasarkan tabel di atas didapat hasil bahwa Ukuran Pemerintah daerah menunjukkan memiliki pengaruh positif terhadap transparansi dengan nilai Original Sampel sebesar 0.257. Pada pengujian ini juga didapatkan nilai T Statistik 3.285 dan nilai *P Value* sebesar 0.000. dengan nilai *P Value* < 0.05 maka memiliki pengaruh signifikan. Oleh sebab itu Hipotesis Ukuran Pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap transparansi didukung.

Dari pengujian Ukuran Pemerintah daerah menunjukkan memiliki pengaruh positif terhadap Akuntabilitas dengan nilai Original Sampel sebesar 0.110. Pada pengujian ini juga didapatkan nilai T Statistik 3.820 dan nilai *P Value* sebesar 0.023. dengan nilai *P Value* < 0.05 maka memiliki pengaruh signifikan. Oleh sebab itu Hipotesis Ukuran Pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas didukung.

Kualitas Laporan Keuangan menunjukkan memiliki pengaruh positif terhadap Akuntabilitas dengan nilai Original Sampel sebesar 0.046. Pada pengujian ini juga didapatkan nilai T Statistik 2.698 dan nilai *P Value* sebesar 0.007. Dengan nilai *P Value* < 0.05 maka memiliki pengaruh signifikan. Oleh sebab itu Hipotesis Kualitas Laporan Keuangan berpengaruh positif terhadap Transparansi didukung.

Kualitas Laporan Keuangan menunjukkan memiliki pengaruh positif terhadap Akuntabilitas dengan nilai Original Sampel sebesar 0.266. Pada pengujian ini juga didapatkan nilai T Statistik 5.887 dan nilai *P Value* sebesar 0.000. Dengan nilai *P Value* < 0.05 maka memiliki pengaruh signifikan. Oleh sebab itu Hipotesis Kualitas Laporan Keuangan berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas didukung.

Variabel Kematangan *e-Government* menunjukkan memiliki pengaruh positif terhadap Akuntabilitas dengan nilai Original Sampel sebesar 0.151. Pada pengujian ini juga didapatkan nilai T Statistik 3.240 dan nilai *P Value* sebesar 0.001. Dengan nilai *P Value* < 0.05 maka memiliki pengaruh signifikan. Oleh sebab itu Hipotesis Kematangan *e-Government* berpengaruh positif terhadap Transparansi didukung.

Variabel Kematangan *e-Government* menunjukkan memiliki pengaruh positif terhadap Akuntabilitas dengan nilai Original Sampel sebesar 0.204. Pada pengujian

ini juga didapatkan nilai T Statistik 5.651 dan nilai *P Value* sebesar 0.000. Dengan nilai *P Value* < 0.05 maka memiliki pengaruh signifikan. Oleh sebab itu Hipotesis Kematangan *e-Government* berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas didukung.

### **4.3 Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Setelah dilakukan pengujian maka didapatkan beberapa hasil yang menunjukkan pengaruh antar variabel sehingga dapat menentukan apakah hipotesis tersebut didukung atau tidak didukung. Pada bagian ini akan membahas hasil pengujian yang telah dilakukan.

#### **4.4.1 Ukuran Pemerintah daerah berpengaruh terhadap tingkat transparansi Pemerintah Daerah.**

Hipotesis Pertama (H1) menguji Ukuran Pemerintah daerah terhadap tingkat transparansi Pemerintah Daerah. Hasil yang didapatkan tingkat signifikansi yaitu 0.000, hasil ini didapat nilai yang lebih kecil dari 0.05 dan menunjukkan *Original Sample* sebesar 0.257. Hal ini menunjukkan bahwa Ukuran Pemerintah daerah memiliki pengaruh terhadap transparansi pemerintah daerah sehingga hipotesis pertama (H1) **didukung** atau **diterima**.

Alasan berkaitan dengan diterimanya hipotesis pertama, secara teoritis ukuran pemerintah yang besar dalam hal ini adalah besarnya aset yang dikelola dikaitkan dengan tekanan transparansi dari masyarakat. Dengan sumber daya aset yang besar, seharusnya pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan berupa transparansi melalui pemanfaatan dan pengelolaan aset yang dikuasi. Aset yang besar apabila dikelola dengan tepat dapat digunakan untuk membuat fasilitas penunjang pelayanan publik yang transparan. Tak hanya itu, faktor kebijakan dan latar

belakang pemimpin daerah juga dapat berpengaruh. Semakin tinggi pengetahuan pemimpin daerah terkait pentingnya transparansi, maka pemimpin daerah tersebut akan memanfaatkan aset besar yang dimiliki untuk membuat kebijakan dan program-program untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan.

Trisnawati (2014), menyatakan bahwa ukuran pemerintah daerah memengaruhi terwujudnya transparansi pemerintah daerah. Dari hal ini dapat dilihat pengaruh besar kecil ukuran pemerintah daerah dalam hal ini aset yang dikelola, pemerintah dapat memaksimalkan untuk memberikan pelayanan dan meningkatkan kinerja pemerintahan daerah tersebut sehingga dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat. Akan tetapi berbeda dengan Adiputra, *et al.*, (2018) yang memberikan hasil yang berbeda bahwa Ukuran Pemerintah daerah tidak memengaruhi transparansi pemerintah daerah di Indonesia. Perbedaan terjadi bisa jadi dikarenakan perbedaan kepemimpinan dan kebijakan yang dibuat dalam pengelolaan aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

Implikasi dari hasil penelitian ini adalah semakin besar ukuran pemerintah daerah dilihat dari sisi aset yang dikuasi, maka fasilitas yang menunjang terwujudnya transparan seperti halnya pemanfaatan dan pengembangan *e-Government* seharusnya mudah diwujudkan. Dengan pemanfaatan aset yang besar untuk pengembangan *e-Government* dapat memberikan dampak positif berupa semakin mudahnya aksesibilitas informasi pemerintah daerah bagi masyarakat atau pihak yang berkepentingan termasuk investor dan lembaga legislatif daerah. Informasi pemerintah akan sangat terbuka sehingga dapat diakses kapan saja dan dimana saja melalui perangkat elektronik yang terhubung internet.

#### **4.4.2 Ukuran Pemerintah daerah berpengaruh terhadap tingkat Akuntabilitas Pemerintah Daerah.**

Hipotesis Kedua (H2) menguji Ukuran Pemerintah daerah terhadap tingkat Akuntabilitas Pemerintah daerah. Hasil yang didapatkan menunjukkan tingkat signifikansi yaitu 0.023, hasil yang didapat lebih kecil dari 0.05 dan menunjukkan *Original Sample* sebesar 0.110, hal ini dapat disimpulkan bahwa Ukuran Pemerintah daerah memiliki pengaruh terhadap Akuntabilitas pemerintah daerah sehingga hipotesis kedua (H2) **Didukung** atau **Diterima**.

Latar belakang didukungnya Ukuran Pemerintah daerah ditinjau dari segi aset mempengaruhi Akuntabilitas bisa jadi dikarenakan *governance* pemerintah yang dilakukan sudah terstruktur. Hal ini sesuai dengan teori agensi bahwa pemerintah diberikan tuntutan dan kewajiban untuk optimal dalam mengelola sebuah aset daerah. Sehingga dengan kewajiban itu, perangkat daerah akan berupaya melakukan pengelolaan yang optimal untuk mewujudkan akuntabilitas. Dengan aset yang besar pemerintah daerah dapat lebih memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan aset. Contoh pengelolaan aset yang dapat dilakukan yaitu memanfaatkan aset tersebut untuk membuat sistem, kebijakan ataupun infrastruktur maka akan memberikan dukungan terhadap terwujudnya akuntabilitas.

Hasil dari penelitian ini yang menemukan bahwa ukuran pemerintah daerah memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pemerintah daerah. Hasil ini memiliki perbedaan dengan Wilopo (2017) yang menyatakan Ukuran Pemerintah diukur dari nilai aset bahwa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pemerintah daerah di Indonesia. Dalam penelitian tersebut pengelolaan yang kurang baik menyebabkan

kurangnya dukungan atau fasilitas yang dapat meningkatkan akuntabilitas dalam pemerintah daerah.

Implikasi dari hasil yang ditemukan yaitu besar atau kecilnya ukuran pemerintah daerah ditinjau dari segi aset memiliki pengaruh terhadap tingkat akuntabilitas pemerintah daerah. Dengan hasil tersebut, pemerintahan dengan aset yang besar perlu memanfaatkan aset tersebut seperti membuat sebuah infrastruktur sistem akuntabilitas dan melakukan pelatihan kepada para penggunanya dalam hal ini perangkat daerah. Apabila pembuatan sistem tersebut dapat terwujud maka segala aktifitas pemerintah daerah dapat lebih akuntabel dan informasi komprehensif dapat diberikan kepada masyarakat, investor dan pihak berkepentingan lainnya.

#### **4.4.3 Kualitas Laporan Keuangan berpengaruh terhadap tingkat transparansi Pemerintah Daerah.**

Hipotesis Ketiga (H3) menguji Kualitas Laporan Keuangan terhadap tingkat transparansi Pemerintah daerah. Hasil yang didapatkan yaitu 0.007, hasil ini menunjukkan nilai yang lebih kecil dari 0.05 dan menunjukkan *Original Sample* sebesar 0.046. Dapat disimpulkan bahwa Kualitas Laporan Keuangan memiliki pengaruh terhadap transparansi pemerintah daerah sehingga hipotesis ketiga (H3) **Didukung** atau **Diterima**.

Kualitas Laporan yang baik tercermin dari opini audit yang diberikan oleh Badan Pengawas Keuangan atau BPK. Apabila BPK telah memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian maka memberikan tanda bahwa pemerintah daerah telah memaparkan Laporan Keuangan yang sudah sesuai dengan standard dan tidak terjadi kesalahan yang bersifat material. Hal ini sesuai dengan teori legitimasi bahwa semakin baik

opini audit maka dapat dikatakan semakin patuh terhadap peraturan yang telah ditentukan dan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. keterbukaan informasi sudah diatur oleh pemerintah pusat melalui perundang-undangan, dengan mewujudkan keterbukaan informasi maka menunjukkan kinerja yang optimal dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa Kualitas Laporan Keuangan memiliki pengaruh terhadap transparansi pada pemerintah daerah yang ada di Indonesia. Hasil ini memiliki persamaan dari penelitian Adiputra, (2018) yang menyatakan kualitas laporan keuangan dapat memengaruhi transparansi pada pemerintah daerah yang ada di Indonesia. Semakin baik kualitas laporan keuangan dari pemerintah daerah maka menandakan semakin patuhnya terhadap standard yang ditentukan.

Implikasi dari hasil dari penelitian ini adalah semakin baik kualitas laporan ditinjau dari opini audit BPK maka memberikan tanda semakin patuhnya pemerintah daerah terhadap sebuah standard yang telah dibuat. Wujud dari kepatuhan lainnya pemerintah perlu melaksanakan keterbukaan informasi sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan informasi Pemerintahan (UU KIP) untuk meningkatkan kepercayaan dadi masyarakat. Dengan keterbukaan informasi pemerintah daerah, masyarakat akan mendapatkan dampak positif berupa kemudahan aksesibilitas informasi. Dengan kemudahan yang dirasakan masyarakat maka dapat bertambahnya informasi yang diterima oleh masyarakat dan berdampak pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Informasi yang mudah diakses juga berpengaruh kepada para investor dan calon investor berkaitan dengan dana yang diinvestasikan dalam pengembangan daerah.

#### **4.4.4 Kualitas Laporan Keuangan berpengaruh terhadap tingkat Akuntabilitas Pemerintah Daerah.**

Hipotesis Keempat (H4) menguji Kualitas Laporan Keuangan terhadap tingkat Akuntabilitas Pemerintah daerah. Hasil yang didapatkan tingkat signifikansi yaitu 0.000, hasil ini menunjukkan nilai yang lebih kecil dari 0.05 dan *Original Sample* sebesar 0.266. Dapat disimpulkan bahwa Kualitas Laporan Keuangan memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pemerintah daerah sehingga hipotesis keempat (H4) **Didukung** atau **Diterima**.

Kualitas Laporan keuangan yang ditinjau dari opini yang diberikan BPK dan mendapatkan opini WTP atau wajar tanpa pengecualian dapat dikatakan bahwa laporan keuangan tersebut telah memaparkan segala informasi keuangan dan non keuangan. Opini WTP yang didapatkan pemerintah daerah memberikan tanda bahwa laporan tersebut memiliki kualitas yang baik sesuai dengan standard yang berlaku. Pemenuhan standard inilah dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, karena pemerintah dianggap telah melakukan kinerja yang optimal. Hal ini sesuai dengan teori legitimasi yang menyatakan sebuah organisasi akan berusaha sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk meningkatkan kepercayaan dari masyarakat.

Hasil yang ditemukan yaitu kualitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap tingkat akuntabilitas pemerintah daerah sejalan dengan Istikomah (2017) yang menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan dapat memengaruhi akuntabilitas pada pemerintah daerah yang ada di Indonesia. Semakin baiknya laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah daerah maka menandakan semakin baiknya akuntabilitas yang dilakukan pemerintah.

Implikasi yang ditemukan yaitu ketika pemerintah menyusun laporan keuangan dengan kualitas yang baik ditinjau dari mendapat opini WTP dari BPK maka menandakan pemerintah melaksanakan akuntabilitas. Dengan penyajian informasi yang jelas dan komprehensif, pemerintah sudah dianggap menerapkan prinsip akuntabel yang menjadi harapan masyarakat. Pemerintah akan mendapatkan dampak positif berupa peningkatan kepercayaan dari masyarakat. Tidak hanya pemenuhan harapan dari masyarakat akan tetapi semakin akuntabelnya pemerintah daerah juga menguntungkan para pemangku kepentingan dalam membuat sebuah keputusan.

#### **4.4.5 Kematangan *e-Government* berpengaruh terhadap tingkat transparansi Pemerintah Daerah.**

Hipotesis Kelima (H5) menguji Kematangan *e-Government* terhadap tingkat Transparansi Pemerintah daerah. Hasil yang didapatkan yaitu 0.001, hasil ini menunjukkan nilai yang lebih kecil dari 0.05 dan menunjukkan *Original Sample* sebesar 0.151. Dapat disimpulkan bahwa Kematangan *E-Government* memiliki pengaruh terhadap Transparansi pemerintah daerah sehingga hipotesis kelima (H5)

**Didukung atau Diterima.**

Kematangan sebuah sistem yang dimiliki pemerintah daerah dalam hal ini *e-Government* dapat mendukung dan mempermudah segala keperluan administrasi yang dilakukan perangkat daerah. Tidak hanya mempermudah dalam hal administrasi, akan tetapi *e-Government* yang sudah semakin matang dan mapan mampu menjadi alat yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah meningkatkan transparansi informasi kepada masyarakat. Dengan bantuan *Website* yang memiliki

fitur mapan, pemerintah bisa mempublikasikan segala aktivitas keuangan dan non keuangannya. Oleh sebab itu keamanan dari sistem *e-Government* memiliki peran penting dalam meningkatkan transparansi dari pemerintah daerah, sehingga masyarakat dapat mengakses segala bentuk informasi daerah dimana saja dan kapan saja asal terhubung ke jaringan internet.

Hasil ini sejalan dengan Latif dan Saadah (2019) yang menemukan hal sama bahwa kematangan sebuah *e-Government* dapat memberikan pengaruh terhadap tingkat Transparansi yang dilakukan pemerintah daerah. Penerapan *e-Government* yang matang mendukung peningkatan transparansi terhadap penyajian informasi aktifitas pemerintah daerah (Gunawan & Rizky, 2016).

Implikasi yang didapat yaitu pentingnya pengembangan dari sistem *e-Government* pemerintahan. Semakin matang *e-Government* pemerintah daerah maka tingkat transparansi pemerintah daerah akan meningkat. Keterbukaan informasi semakin mudah diakses dimana saja dan kapan saja dengan perangkat yang tersambung internet. Bagi lembaga legislatif sebagai lembaga yang juga memiliki fungsi pengawasan akan lebih mudah untuk mendapatkan informasi dan mengawasi jalannya pemerintahan di suatu daerah. Hal ini menandakan pemerintah daerah harus serius dalam membuat kebijakan dalam peningkatan *e-Government* agar semakin banyak layanan yang dapat dirasakan oleh masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan.

#### **4.4.6 Kematangan *e-Government* berpengaruh terhadap tingkat Akuntabilitas Pemerintah Daerah.**

Hipotesis Keenam (H6) menguji Kematangan *e-Government* terhadap tingkat Akuntabilitas Pemerintah daerah. Hasil yang didapatkan yaitu 0.000, hasil ini menunjukkan nilai yang lebih kecil dari 0.05 dan menunjukkan *Original Sample* sebesar 0.204. Dapat disimpulkan bahwa Kematangan *e-Government* memiliki pengaruh terhadap Akuntabilitas pemerintah daerah sehingga hipotesis keenam (H6) **Didukung** atau **Diterima**.

Akuntabilitas merupakan sebuah pemaparan dan penjelasan dari sebuah hasil kinerja oleh pemerintah daerah. Hasil ini lalu dibuat sebuah laporan untuk diberikan kepada masyarakat atas hasil kinerja dari pemerintah daerah. Dengan adanya *e-Government* maka pemerintah terbantu dalam proses pemaparan hasil kinerja. Oleh sebab itu semakin matang dan kompleks fitur *e-Government* yang pemerintah daerah maka akan meningkatkan integrasi informasi dan dapat meminimalisir asimetri informasi. Dengan sistem yang semakin matang, masyarakat juga dapat merasakan dampaknya berupa dapat mengidentifikasi hasil kinerja ya pemerintah secara cepat melalui sistem *e-Government*.

Hal ini sejalan dengan Gunawan (2016) yang menyatakan penerapan *e-Government* dapat berpengaruh terhadap Akuntabilitas publik. Latif dan Saadah (2019) menyatakan kematangan sebuah *e-Government* mempengaruhi tingkat Akuntabilitas yang dilakukan pemerintah daerah, hal ini terjadi karena, semakin matangnya sebuah *e-Government* memberikan kemudahan dalam pemaparan sebuah informasi kepada masyarakat.

Implikasi yang dari hasil ini *e-Government* memiliki peran penting dalam meningkatkan Akuntabilitas. Oleh sebab itu pemerintah perlu menyadari pentingnya sebuah pengembangan dari sebuah sistem *e-Government*. Semakin matang *e-Government* maka tingkat Akuntabilitas pemerintah daerah akan meningkat dikarenakan pemerintah dapat mengintegrasikan informasi keuangan dan non keuangan secara cepat dan tepat. Hal ini memberikan dampak yang baik bagi masyarakat karena mendapatkan informasi keuangan dan non keuangan yang sesuai dan tidak terjadi asimetri informasi. Implikasi lain bagi badan legislatif yaitu dengan dukungan *e-Government* yang matang, maka sebagai lembaga yang juga memiliki fungsi pengawasan akan lebih mudah untuk mengawasi jalannya pemerintahan di suatu daerah



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan guna menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi transparansi dan akuntabilitas yang ada di pemerintahan daerah yang ada di Indonesia baik pada tingkat Kabupaten/ Kota maupun Provinsi. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan data sekunder yang diambil dari laporan keuangan pemerintah daerah dan website yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Penelitian ini meneliti 541 pemerintah daerah. Berdasarkan dari hasil analisis dan pengukuran ditemukan hasil sebagai berikut:

1. Ukuran pemerintah daerah memiliki pengaruh terhadap transparansi pada pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan semakin besar pemerintah daerah diukur dari aset maka apabila dikelola dengan baik dapat memberikan dampak meningkatnya transparansi pemerintah daerah.
2. Ukuran pemerintah daerah memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pada pemerintah daerah. Semakin besar pemerintah daerah diukur dari aset maka apabila aset tersebut dikelola dengan baik, maka akan memberikan dampak meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah.
3. Kualitas Laporan Keuangan pemerintah daerah memiliki pengaruh terhadap transparansi pada pemerintah daerah. Apabila kualitas laporan keuangan semakin baik, diukur dari opini BPK. Hal ini menandakan sebuah kepatuhan terhadap sebuah standard yang telah dibuat sehingga dapat meningkatkan keterbukaan informasi yang sudah diatur oleh Undang-Undang.

4. Kualitas Laporan Keuangan pemerintah daerah memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pada pemerintah daerah. Dengan kualitas laporan keuangan semakin baik, diukur dari opini BPK memberikan indikasi bahwa semua informasi telah dipaparkan dengan jelas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin baik kualitas laporan keuangan maka semakin akuntabelnya pemerintah daerah.
5. Kematangan *e-Government* memiliki pengaruh terhadap transparansi pada pemerintah daerah. Dengan dukungan *e-Government* yang matang pemerintah dengan mudah melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Dampaknya masyarakat dapat mendapatkan informasi kapan saja melalui perangkat elektronik yang terhubung dengan internet.
6. Kematangan *e-Government* memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pada pemerintah daerah. Hal ini memadatkan semakin matang sistem *e-Government* pemerintah, maka akuntabilitas dapat terwujud atas dukungan sistem tersebut.

## **5.2 Kontribusi dan Implikasi**

### **5.2.1 Kontribusi**

Sebagai kontribusi bagi kedepannya, diharapkan melalui penelitian ini dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan menjadi sebuah acuan ataupun sumber referensi sebagai tambahan yang relevan bagi akademisi yang akan melaksanakan penelitian berikutnya dengan topik transparansi dan akuntabilitas pada pemerintah daerah yang ada di Indonesia.

2. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah daerah sebagai referensi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dengan melakukan pengelolaan aset yang baik, peningkatan kualitas penyusunan laporan keuangan dan meningkatkan kematangan dari *e-Government* yang dimiliki pemerintah daerah melalui dinas-dinas terkait.

### **5.2.2. Implikasi**

Dari hasil penelitian maka terdapat beberapa implikasi yang dapat disimpulkan yaitu

1. Implikasi bagi masyarakat atas terwujudnya transparansi dan akuntabilitas yaitu masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi keuangan maupun non keuangan pemerintahan dan dengan terlaksananya transparansi dan akuntabilitas menandakan *governance* yang dilakukan pemerintah telah baik, sehingga dana pembangunan digunakan tepat sasaran. Hal ini akan memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat.
2. Implikasi yang kedua yaitu bagi para investor dengan semakin baiknya kualitas laporan pemerintah daerah dan ditambah dengan dukungan kematangan *e-Government*, maka akan mempermudah para investor untuk membuat sebuah keputusan investasinya terhadap suatu daerah. Semakin mudah dan akuratnya informasi yang diberikan maka investor akan lebih cermat dalam mengelola dana investasinya di lingkungan pemerintah.
3. Bagi badan legislatif pemerintah daerah sebagai badan pengawas jalannya pemerintah dengan semakin mudahnya informasi didapat dan semakin akuratnya sebuah informasi, maka akan mempermudah dalam hal pengawasan jalannya pemerintahan suatu daerah.

4. Bagi pemerintah daerah dari hasil yang didapat pada penelitian ini pemerintah perlu melakukan pengelolaan aset dengan tepat sehingga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dengan cara membuat sebuah program-program pendukung. Selain itu pemerintah perlu meningkatkan kematangan *e-Government* agar fiturnya semakin lengkap dan tingkat transparansi dan akuntabilitas dapat terwujud.

### **5.3 Keterbatasan Penelitian dan Saran**

#### **5.3.1 Keterbatasan**

Dalam penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang dialami oleh penulis yang bisa jadi memberikan pengaruh terhadap hasil penelitian. Berikut keterbatasan pada penelitian ini:

1. Keterbatasan pada penelitian ini adalah beberapa website pemerintah daerah terdapat beberapa yang tidak dapat diakses sehingga dapat menyulitkan dalam mendapatkan beberapa data keuangan dan non keuangan.
2. Keterbatasan yang kedua pada penelitian ini adalah data pada penelitian ini merupakan data ordinal yang mengakibatkan data terpusat pada satu angka sehingga membuat pada penelitian ini data tidak berdistribusi dengan normal.

#### **5.3.2 Saran**

Dalam penelitian ini didapat beberapa saran untuk penelitian selanjutnya yaitu:

1. Untuk Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan beberapa variabel yang dapat mempengaruhi transparansi dan akuntabilitas.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengklasifikasikan ukuran pemerintah daerah yang diukur menggunakan aset sesuai dengan fungsinya

seperti a) aset daerah yang digunakan untuk operasi pemerintah daerah (*local government used assets*), b) aset daerah yang digunakan masyarakat dalam rangkapelayanan publik (*social used assets*), dan c) aset daerah yang tidak digunakan untuk pemerintah maupun publik (*surplus property*).

3. Penelitian selanjutnya diharapkan tidak hanya pada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, akan tetapi juga pada tingkatan SKPD.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adiputra, I. M., Utama, S., & Rossieta, H. (2018). Transparency of local government in Indonesia. *Asian Journal of Accounting Research*, 3(1), 123-138.
- Amrizal, I., Gugus, I., & Yoney, W. P. (2019). Peran Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Membangun Kepercayaan Publik. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(1), 156-174.
- Auditya, L., Husaini, & Lismawati. (2013). Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Fairness*, 3(1), 21-42.
- Bertot, J. C., Grimes, P. T., & M., J. (2012). Promoting transparency and accountability through ICTs, social media, and collaborative *e-Government*. *Transforming Government: People, Process and Policy*, 6(1), 78-91.
- Bupati Muba Anak Alex Noerdin Dikabarkan Terjaring OTT KPK. (2021, Oktober Sabtu). Diambil kembali dari [cnnIndonesia.com: https://www.cnnIndonesia.com/nasional/20211015235854-12-708528/bupati-muba-anak-alex-noerdin-dikabarkan-terjaring-ott-kpk](https://www.cnnIndonesia.com/nasional/20211015235854-12-708528/bupati-muba-anak-alex-noerdin-dikabarkan-terjaring-ott-kpk)
- Deegan, C. M. (2018). Legitimacy theory Despite its enduring popularity and contribution, time is right for a necessary makeover. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 32(8), 2307-2329.
- Dowling, J., & Pfeffer, J. (1975). Organizational Legitimacy: Social Values and Organizational Behavior. *The Pacific Sociological Review*, 18(1), 122-136.
- Dwi, A., Harpanto, G, S., & Fahrizal. (2015). Penilaian Indeks Akuntabilitas Instansi Pemerintah. *Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara (BPK RI)*, 1(1), 21-42.
- Eisenhardt, & M., K. (1989). Agency Theory: An Assessment and Review. *The Academy of Management Review*, 14(1), 57-74.
- Fietkiewicz, K. J., Mainka, A., & Stock, W. G. (2017). eGovernment in cities of the knowledge society. An empirical investigation of Smart Cities' governmental websites. *Government Information Quarterly*, 34(1), 75-83.
- Gunawan, & Rizky, D. (2016). Penerapan Sistem e-Budgeting terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Publik (Studi Pada Pemerintah Kota Surabaya). *AKRUAL Jurnal Akuntansi*, 8(1), 72-102.

- Ghozali, I., & Latan, H. (2014). Dalam I. Ghozali, & H. Latan, *Partial Least Squares* (Konsep Teknik dan Aplikasi menggunakan Program) Smart PLS 3.0. Semarang: Universitas Diponegoro Semarang.
- Ghozali, I. 2018. Aplikasi Analisis *Multivariate* dengan Program IBM SPSS 25. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang
- Gio, P. U., Caraka, R. E., Mulyaningsih, H. D., Sondari, M. C., Widiyanto, S., & Kurniawan, R. (2019). Dalam P. U. Gio, R. E. Caraka, H. D. Mulyaningsih, M. C. Sondari, S. Widiyanto, & R. Kurniawan, *Partial Least Squares Path Modeling (PLS-PM) dengan Statcal-PLSPM*. Medan: USU Press.
- Habibah, A. F. (2021, September 14). *Sri Mulyani pastikan jaga akuntabilitas keuangan dalam tangani COVID*. Diambil kembali dari antranews.com: <https://www.antaranews.com/berita/2391021/sri-mulyani-pastikan-jaga-akuntabilitas-keuangan-dalam-tangani-covid>
- Indoensia, R. (2008). Keterbukaan Informasi Publik. *Undang-Undang (UU)*, No 14.
- Indonesia, R. (2003). Kebijakan dan Strategi Nasional. *Instruksi Presiden Republik Indonesia*, No 3.
- Indonesia, R. (2005). Sistem Informasi Keuangan Daerah. *Peraturan Pemerintah (PP)*, NO 56.
- Indonesia, R. (2010). Strandart Akuntansi Pemerintahan. *Peraturan Pemerintah PP*, NO 71.
- Indonesia, R. (2012). Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah. *Instruksi Menteri Dalam Negeri* , No 188-52/1797/SJ/2012 .
- Istikomah, & Mutmainah, K. (2017). Determinan Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah melalui Internet. *Jurnal Ilmiah FE UNSIQ*, 12(1), 1-17.
- JENSEN, M. C., & Mecking, W. H. (1976). *Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure* . *Journal of Financial Economics* 3, 3(4), 305-360.
- Khan, A., & Krishnan, S. (2019). Conceptualizing the impact of corruption in national institutions and national stakeholder service systems on e-Government maturity. *International Journal of Information Management*, 46(1), 23-36.

- Kristanto, S. B. (2009). Pengaruh Ukuran Pemerintahan, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dan Belanja Modal Sebagai Prediktor Kelemahan Pengendalian Internal. *Jurnal Akuntansi UKRIDA*, 9(10), 1-17.
- Lakka, S., Stamati, T., Michalakelis, C., & Anagnostopoulo, D. (2015). *Cross-national analysis of the relation of eGovernment maturity and OSS growth. Technological Forecasting & Social Change*, 99(2), 132-147.
- Latif, D. V., & Saadah. (2019). Evaluasi Penerapan *e-Government* Kota Bandung di tinjau dari Akuntabilitas dan Trabsparansi. *Journals of Economics Development Issues (JEDI)*, 2(2), 24-31.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Erlangga.
- \_\_\_\_\_. (2011). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press.
- Manik, T. (2013). Analisis Pengaruh Kemakmuran, Ukuran Pemerintah Daerah, Inflasi, Intergovernmental Revenue dan Kemiskinan terhadap Pembangunan Manusia dan Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Organisasi dan Manajemen (JOM)*, 9(2), 107-124.
- Mardiasmo. (2018). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : ANDI .
- Mathew, J. A. (1997). *Introduction to the Special Issue. Human Relation*.
- Muhtar, Putro, D. A., & Sutaryo. (2017). Penentu transparansi pemerintah daerah: sebuah studi pada pemerintah daerah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 21(2), 141-156.
- Pina, V., Torres, L., & Royo, S. (2009). *E-Government evolution in EU local governments: a comparative perspective. Online Information Review*, 22(6), 1137-1168.
- Rahman, M. A., Suwandi, M., & Hamid, A. (2016). Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pencapaian Good Governance. *Jurnal Manajemen Ide dan Inspirasi*, 3(2), 25-41.
- Sa'adah, B. (2015). Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran melalui *E-Government* (Studi Tentang Penganggaran di Pemerintahan Daerah Kabupaten Blitar). *Kebijakan dan Manajemen Publik*, 3(2), 1-10.
- Sahara, W. (2021, Agustus 23). *Awal Mula Kasus Korupsi Bansos Covid-19 yang Menjerat Juliari hingga Divonis 12 Tahun Penjara*. Diambil kembali dari Kompas.com:

<https://nasional.kompas.com/read/2021/08/23/18010551/awal-mula-kasus-korupsi-bansos-covid-19-yang-menjerat-juliari-hingga-divonis?page=all>

- Sari, N. M., & Mustanda, I. K. (2019). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Journal Manajemen UNUD*, 8(8), 4759-4787.
- Sekaran, U. & Bougie, R. (2016) *Research Methods for Business: A Skill- Building Approach*. 7th Edition, Wiley & Sons, West Sussex.
- Siriwardhane, P., & Taylor, D. (2017). *Perceived accountability for local government infrastructure assets: the influence of stakeholders*. *Pacific Accounting Review*, 29(4), 551-572.
- Sofyani, H., Riyadh, H. A., & Fahlevi, H. (2020). *Improving service quality, accountability and transparency of local government: The intervening role of information technology governance*. *Cogent Business & Management*, 7(1), 1-20.
- Suchman, M. C. (1995). *Managing Legitimacy: Strategic and Institutional Approaches*. *The Academy of Management Review*, 20(3), 571-610.
- Trisnawati, M. D., & Achmad, K. (2014). Determinan Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Melalui Internet. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 2(2), 1-23.
- Wilopo, I. A. (2017). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas dan Transparansi Informasi Keuangan Daerah Melalui Website. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 7(1), 61-78.
- Zeyn, E. (2011). Pengaruh Penerapan Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Akuntabilitas Keuangan. *Trikonomika*, 10(1), 152-62.

## Lampiran-Lampiran Lampiran 1. 1 Hasil Olah Data

### Uji Hipotesis

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviati...	T Statistics ( O/S...	P Values
Kematangan E-Government (X3) -> Akuntabilitas (Y2)	0.204	0.196	0.036	5.651	0.000
Kematangan E-Government (X3) -> Transparansi (Y1)	0.151	0.141	0.047	3.240	0.001
Kualitas Laporan Keuangan (X2) -> Akuntabilitas (Y2)	0.266	0.260	0.045	5.887	0.000
Kualitas Laporan Keuangan (X2) -> Transparansi (Y1)	0.046	0.038	0.017	2.698	0.007
Ukuran Pemerintah Daerah (X1) -> Akuntabilitas (Y2)	0.110	0.146	0.048	2.285	0.023
Ukuran Pemerintah Daerah (X1) -> Transparansi (Y1)	0.257	0.306	0.067	3.820	0.000

### R-Square (R<sup>2</sup>)

	R Square	R Square Adjus...
Akuntabilitas (Y2)	0.147	0.142
Transparansi (Y1)	0.101	0.096

### Q-Square (Q<sup>2</sup>)

	SSO	SSE	Q <sup>2</sup> (=1-SSE/SSO)
Akuntabilitas (Y2)	541.000	464.378	0.142
Kematangan E-Government (X3)	541.000	541.000	
Kualitas Laporan Keuangan (X2)	541.000	541.000	
Transparansi (Y1)	541.000	490.727	0.093
Ukuran Pemerintah Daerah (X1)	541.000	541.000	

### Model Fit

	Saturated Model	Estimated Mo...
SRMR	0.000	0.052
d_ULS	0.000	0.040
d_G	0.000	0.010
Chi-Square		29.054
NFI	1.000	0.846

Lampiran 1. 2 Daftar Pemerintah daerah dan Hasil Pengumpulan Data Variabel

No	Nama Daerah	Tingkat	Ukuran Pemerintah Daerah (X1)	Kualitas Laporan Keuangan (X2)	Kematangan <i>E-Government</i> (X3)	Transparansi (Y1)	Akuntabilitas (Y2)
1	Aceh	Provinsi	28,454,501	1	3	2	2
2	Aceh Barat	Kabupaten	3,264,165	1	3	3	2
3	Aceh Barat Daya	Kabupaten	1,893,303	1	3	3	2
4	Aceh Besar	Kabupaten	3,010,679	1	2	3	2
5	Aceh Jaya	Kabupaten	2,344,958	1	2	2	2
6	Aceh Selatan	Kabupaten	2,623,404	1	2	2	2
7	Aceh Singkil	Kabupaten	1,455,518	1	1	1	2
8	Aceh Tamiang	Kabupaten	2,648,962	1	2	2	2
9	Aceh Tengah	Kabupaten	2,480,736	1	2	2	2
10	Aceh Tenggara	Kabupaten	3,211,821	1	2	2	2
11	Aceh Timur	Kabupaten	3,252,701	1	2	2	2
12	Aceh Utara	Kabupaten	4,674,629	1	2	2	2
13	Bener Meriah	Kabupaten	1,622,788	1	2	2	2
14	Bireuen	Kabupaten	3,163,869	1	2	2	2
15	Gayo Lues	Kabupaten	2,141,664	1	2	2	2
16	Nagan Raya	Kabupaten	2,010,273	1	2	2	2
17	Pidie	Kabupaten	3,563,892	1	2	2	2
18	Pidie Jaya	Kabupaten	1,831,494	1	2	2	2
19	Simeulue	Kabupaten	1,630,310	1	2	2	2
20	Banda Aceh	Kota	5,364,536	1	2	2	2

<b>21</b>	Langsa	Kota	1,878,172	1	3	3	2
<b>22</b>	Lhokseumawe	Kota	1,839,921	1	2	2	2
<b>23</b>	Sabang	Kota	1,332,313	1	3	2	2
<b>24</b>	Subulussalam	Kota	1,350,168	0	1	1	2
<b>25</b>	Sumatera Utara	Provinsi	18,616,601	1	2	2	2
<b>26</b>	Asahan	Kabupaten	3,497,418	1	1	1	2
<b>27</b>	Batu Bara	Kabupaten	2,210,470	1	3	2	2
<b>28</b>	Dairi	Kabupaten	2,044,203	1	2	2	2
<b>29</b>	Deli Serdang	Kabupaten	7,388,243	1	1	1	2
<b>30</b>	Humbang Hasundutan	Kabupaten	1,936,667	1	2	2	3
<b>31</b>	Karo	Kabupaten	2,657,502	1	2	2	1
<b>32</b>	Labuhan Batu	Kabupaten	2,743,988	0	2	2	2
<b>33</b>	Labuhanbatu Selatan	Kabupaten	1,410,003	1	2	2	1
<b>34</b>	Labuhanbatu Utara	Kabupaten	1,902,850	1	2	2	2
<b>35</b>	Langkat	Kabupaten	4,065,203	1	2	2	2
<b>36</b>	Mandailing Natal	Kabupaten	2,024,586	0	2	2	1
<b>37</b>	Nias	Kabupaten	2,088,344	0	1	1	2
<b>38</b>	Nias Barat	Kabupaten	1,119,502	0	1	1	1
<b>39</b>	Nias Selatan	Kabupaten	1,928,967	0	2	1	1
<b>40</b>	Nias Utara	Kabupaten	1,863,481	0	2	1	1
<b>41</b>	Padang Lawas	Kabupaten	1,675,570	1	1	1	1
<b>42</b>	Padang Lawas Utara	Kabupaten	1,355,145	1	2	1	1
<b>43</b>	Pakpak Bharat	Kabupaten	990,387	0	1	1	2
<b>44</b>	Samosir	Kabupaten	1,605,087	1	2	1	3
<b>45</b>	Serdang Bedagai	Kabupaten	2,236,316	1	1	2	2
<b>46</b>	Simalungun	Kabupaten	3,284,346	0	2	1	1

47	Tapanuli Selatan	Kabupaten	2,485,661	1	2	2	2
48	Tapanuli Tengah	Kabupaten	1,683,865	1	2	1	1
49	Tapanuli Utara	Kabupaten	2,117,334	1	2	2	2
50	Toba Samosir	Kabupaten	1,827,631	1	2	2	2
51	Binjai	Kota	1,336,699	1	2	2	2
52	Gunung Sitoli	Kota	1,598,436	1	2	2	2
53	Medan	Kota	32,901,545	0	1	1	2
54	Padang Sidempuan	Kota	1,281,397	0	1	1	2
55	Pematang Siantar	Kota	3,270,631	0	1	1	1
56	Sibolga	Kota	1,573,618	1	2	2	2
57	Tanjungbalai	Kota	1,241,001	0	2	2	2
58	Tebing Tinggi	Kota	1,833,527	1	2	2	2
59	Sumatera Barat	Provinsi	10,896,093	1	2	1	3
60	Agam	Kabupaten	2,044,621	1	2	1	2
61	Dharmasraya	Kabupaten	2,453,074	1	2	2	2
62	Kepulauan Mentawai	Kabupaten	1,982,154	1	2	2	2
63	Lima Puluh Kota	Kabupaten	1,724,913	1	2	2	2
64	Padang Pariaman	Kabupaten	1,365,011	1	2	2	2
65	Pasaman	Kabupaten	1,879,392	1	2	1	2
66	Pasaman Barat	Kabupaten	2,263,430	1	2	1	2
67	Pesisir Selatan	Kabupaten	2,309,214	1	2	2	2
68	Sijunjung	Kabupaten	1,681,904	1	2	1	2
69	Solok	Kabupaten	1,710,627	1	2	2	2
70	Solok Selatan	Kabupaten	1,805,250	1	2	2	2
71	Tanah Datar	Kabupaten	1,318,662	1	2	1	1
72	Bukittinggi	Kota	1,620,883	1	3	2	3

<b>73</b>	Padang	Kota	7,813,369	1	3	3	3
<b>74</b>	Padang Panjang	Kota	1,253,357	1	2	2	2
<b>75</b>	Pariaman	Kota	866,797	1	2	2	2
<b>76</b>	Payakumbuh	Kota	1,357,209	1	2	3	3
<b>77</b>	Sawahlunto	Kota	769,706	1	2	2	2
<b>78</b>	Solok	Kota	1,542,290	1	2	2	2
<b>79</b>	Riau	Provinsi	33,062,037	1	2	1	2
<b>80</b>	Bengkalis	Kabupaten	9,910,580	1	2	2	2
<b>81</b>	Indragiri Hilir	Kabupaten	3,919,158	1	3	2	2
<b>82</b>	Indragiri Hulu	Kabupaten	3,379,025	1	2	2	2
<b>83</b>	Kampar	Kabupaten	4,585,418	1	1	2	2
<b>84</b>	Kepulauan Meranti	Kabupaten	2,981,321	1	2	2	2
<b>85</b>	Kuantan Singingi	Kabupaten	2,763,569	1	2	2	2
<b>86</b>	Pelalawan	Kabupaten	4,163,112	1	2	2	2
<b>87</b>	Rokan Hilir	Kabupaten	5,630,169	1	2	1	2
<b>88</b>	Rokan Hulu	Kabupaten	3,281,410	1	3	3	2
<b>89</b>	Siak	Kabupaten	6,390,388	1	3	3	2
<b>90</b>	Dumai	Kota	3,261,131	1	2	2	2
<b>91</b>	Pekanbaru	Kota	7,548,887	1	3	3	2
<b>92</b>	Jambi	Provinsi	8,941,719	1	3	2	2
<b>93</b>	Batang Hari	Kabupaten	1,935,179	1	2	2	3
<b>94</b>	Bungo	Kabupaten	1,804,261	1	2	2	2
<b>95</b>	Kerinci	Kabupaten	1,709,156	1	3	3	2
<b>96</b>	Merangin	Kabupaten	2,170,243	1	2	2	2
<b>97</b>	Muaro Jambi	Kabupaten	2,389,072	1	3	2	2
<b>98</b>	Sarolangun	Kabupaten	2,615,570	1	2	2	2

99	Tanjung Jabung Barat	Kabupaten	4,278,433	1	2	2	2
100	Tanjung Jabung Timur	Kabupaten	2,132,858	1	2	3	2
101	Tebo	Kabupaten	2,310,498	1	2	2	2
102	Jambi	Kota	3,708,402	1	3	2	2
103	Sungai Penuh	Kota	1,360,213	1	2	3	2
104	Sumatera Selatan	Provinsi	25,873,032	1	3	2	3
105	Banyuasin	Kabupaten	4,215,741	1	3	2	2
106	Empat Lawang	Kabupaten	2,138,643	1	3	2	2
107	Lahat	Kabupaten	3,283,060	1	3	3	2
108	Muara Enim	Kabupaten	5,942,488	1	3	3	2
109	Musi Banyuasin	Kabupaten	8,913,188	1	2	2	2
110	Musi Rawas	Kabupaten	4,060,690	1	3	3	2
111	Musi Rawas Utara	Kabupaten	2,005,436	1	2	2	2
112	Ogan Ilir	Kabupaten	2,485,883	1	3	3	2
113	OKI	Kabupaten	4,356,787	1	2	2	2
114	OKU	Kabupaten	3,223,304	1	3	3	2
115	OKU Selatan	Kabupaten	2,939,157	1	3	2	2
116	OKU Timur	Kabupaten	2,562,790	1	3	2	2
117	Penukal Abab Lematang Ilir	Kabupaten	2,752,153	1	3	2	2
118	Lubuklinggau	Kota	2,564,719	1	3	2	3
119	Pagar Alam	Kota	2,120,901	1	2	2	2
120	Palembang	Kota	16,278,370	1	3	3	2
121	Prabumulih	Kota	2,501,589	1	3	3	2
122	Bengkulu	Provinsi	6,060,551	1	3	2	2
123	Bengkulu Selatan	Kabupaten	1,311,632	0	3	2	2
124	Bengkulu Tengah	Kabupaten	1,368,625	1	2	1	2

125	Bengkulu Utara	Kabupaten	1,724,767	1	2	1	2
126	Kaur	Kabupaten	1,272,805	1	2	3	2
127	Kepahiang	Kabupaten	1,281,086	1	2	2	2
128	Lebong	Kabupaten	1,625,873	1	2	1	2
129	Mukomuko	Kabupaten	1,777,319	1	2	2	2
130	Rejang Lebong	Kabupaten	1,632,809	1	2	2	2
131	Seluma	Kabupaten	1,715,456	0	2	1	2
132	Bengkulu	Kota	1,839,499	1	3	3	2
133	Lampung	Provinsi	9,717,052	1	3	2	2
134	Lampung Barat	Kabupaten	2,386,359	1	2	3	2
135	Lampung Selatan	Kabupaten	3,549,948	1	2	3	2
136	Lampung Tengah	Kabupaten	3,267,504	1	2	3	2
137	Lampung Timur	Kabupaten	2,666,777	1	2	2	2
138	Lampung Utara	Kabupaten	2,394,313	0	2	1	1
139	Mesuji	Kabupaten	1,976,866	0	2	1	2
140	Pesawaran	Kabupaten	2,308,468	1	2	2	2
141	Pesisir Barat	Kabupaten	1,561,581	1	2	1	2
142	Pringsewu	Kabupaten	2,049,637	1	2	2	2
143	Tanggamus	Kabupaten	2,216,423	1	2	2	2
144	Tulang Bawang	Kabupaten	2,100,160	1	2	1	2
145	Tulang Bawang Barat (Tubaba)	Kabupaten	2,397,292	1	2	2	2
146	Way Kanan	Kabupaten	2,524,192	1	2	1	2
147	Bandar Lampung	Kota	5,341,823	1	3	3	2
148	Metro	Kota	2,941,250	1	3	3	2
149	Bangka Belitung	Provinsi	4,456,676	1	3	3	3
150	Bangka	Kabupaten	2,057,413	1	3	3	3

151	Bangka Barat	Kabupaten	1,467,531	1	2	2	2
152	Bangka Selatan	Kabupaten	1,628,728	1	3	2	2
153	Bangka Tengah	Kabupaten	1,474,197	1	3	3	3
154	Belitung	Kabupaten	2,281,470	0	2	1	2
155	Belitung Timur	Kabupaten	1,595,511	1	2	2	2
156	Pangkal Pinang	Kota	3,059,827	1	2	2	2
157	Kep Riau	Provinsi	6,455,425	1	2	1	3
158	Bintan	Kabupaten	2,719,588	1	2	2	2
159	Karimun	Kabupaten	2,239,130	1	2	2	3
160	Kepulauan Anambas	Kabupaten	1,905,003	1	1	1	2
161	Lingga	Kabupaten	1,813,559	1	1	1	2
162	Natuna	Kabupaten	2,898,543	1	2	1	3
163	Batam	Kota	6,110,123	1	1	2	2
164	Tanjungpinang	Kota	1,839,341	1	2	1	3
165	DKI Jakarta	Provinsi	517,155,089	1	4	3	3
166	Jawa Barat	Provinsi	40,724,440	1	3	2	3
167	Bandung	Kabupaten	11,263,980	1	2	2	3
168	Bandung Barat	Kabupaten	3,481,844	1	2	2	2
169	Bekasi	Kabupaten	13,071,854	1	3	3	2
170	Bogor	Kabupaten	26,492,593	1	2	2	2
171	Ciamis	Kabupaten	3,752,059	1	2	2	2
172	Cianjur	Kabupaten	6,525,736	1	2	2	2
173	Cirebon	Kabupaten	4,574,490	1	2	2	2
174	Garut	Kabupaten	4,827,037	1	2	2	3
175	Indramayu	Kabupaten	5,795,777	1	2	2	2
176	Karawang	Kabupaten	5,354,357	1	2	2	2

<b>177</b>	Kuningan	Kabupaten	2,383,476	1	2	2	2
<b>178</b>		Kabupaten	4,882,131	1	2	2	2
<b>179</b>	Pangandaran	Kabupaten	2,172,555	1	2	2	2
<b>180</b>	Purwakarta	Kabupaten	2,718,473	1	3	3	2
<b>181</b>	Subang	Kabupaten	4,934,942	1	3	2	2
<b>182</b>	Sukabumi	Kabupaten	4,536,783	1	3	2	2
<b>183</b>	Sumedang	Kabupaten	3,400,816	1	2	2	3
<b>184</b>	Tasikmalaya	Kabupaten	5,191,376	1	2	2	2
<b>185</b>	Bandung	Kota	43,525,674	1	3	2	3
<b>186</b>	Banjar	Kota	1,711,898	1	3	2	2
<b>187</b>	Bekasi	Kota	13,504,843	1	3	2	2
<b>188</b>	Bogor	Kota	8,450,865	1	3	2	3
<b>189</b>	Cimahi	Kota	2,698,443	1	2	2	2
<b>190</b>	Cirebon	Kota	3,908,027	1	3	2	2
<b>191</b>	Depok	Kota	12,066,798	1	3	2	2
<b>192</b>	Sukabumi	Kota	1,785,690	1	3	2	3
<b>193</b>	Tasikmalaya	Kota	3,544,157	1	2	2	3
<b>194</b>	Jawa Tengah	Provinsi	37,500,196	1	3	3	3
<b>195</b>	Banjarnegara	Kabupaten	4,469,370	1	2	2	2
<b>196</b>	Banyumas	Kabupaten	6,226,652	1	2	1	3
<b>197</b>	Batang	Kabupaten	2,664,373	1	2	2	2
<b>198</b>	Blora	Kabupaten	3,362,562	1	2	1	2
<b>199</b>	Boyolali	Kabupaten	3,770,144	1	2	2	2
<b>200</b>	Brebes	Kabupaten	4,187,462	1	2	2	2
<b>201</b>	Cilacap	Kabupaten	5,735,055	1	3	2	3
<b>202</b>	Demak	Kabupaten	5,450,473	1	2	2	2

<b>203</b>	Grobogan	Kabupaten	3,642,816	1	2	2	2
<b>204</b>	Jepara	Kabupaten	6,496,679	1	2	2	2
<b>205</b>	Karanganyar	Kabupaten	3,476,942	1	2	2	2
<b>206</b>	Kebumen	Kabupaten	4,482,323	1	2	2	2
<b>207</b>	Kendal	Kabupaten	3,026,908	1	2	2	2
<b>208</b>	Klaten	Kabupaten	4,157,398	1	2	2	2
<b>209</b>	Kudus	Kabupaten	4,468,531	1	2	2	2
<b>210</b>	Magelang	Kabupaten	3,270,629	1	2	2	2
<b>211</b>	Pati	Kabupaten	6,439,754	1	3	3	2
<b>212</b>	Pekalongan	Kabupaten	3,020,680	1	2	2	2
<b>213</b>	Pemalang	Kabupaten	3,786,927	1	3	3	2
<b>214</b>	Purbalingga	Kabupaten	2,846,328	1	2	2	2
<b>215</b>	Purworejo	Kabupaten	2,987,231	1	3	3	2
<b>216</b>	Rembang	Kabupaten	2,143,033	1	3	3	2
<b>217</b>	Semarang	Kabupaten	4,689,787	1	2	2	2
<b>218</b>	Sragen	Kabupaten	3,941,848	1	2	2	2
<b>219</b>	Sukoharjo	Kabupaten	5,194,655	1	2	2	2
<b>220</b>	Tegal	Kabupaten	3,377,567	1	2	2	2
<b>221</b>	Temanggung	Kabupaten	3,240,096	1	2	2	2
<b>222</b>	Wonogiri	Kabupaten	3,740,376	1	2	2	3
<b>223</b>	Wonosobo	Kabupaten	3,390,531	1	2	2	2
<b>224</b>	Magelang	Kota	4,012,816	1	3	3	2
<b>225</b>	Pekalongan	Kota	2,856,674	1	2	2	3
<b>226</b>	Salatiga	Kota	3,072,155	1	2	2	2
<b>227</b>	Semarang	Kota	18,159,413	1	3	3	2
<b>228</b>	Surakarta	Kota	11,719,105	1	3	3	2

<b>229</b>	Tegal	Kota	2,417,612	1	2	2	2
<b>230</b>	DI Yogyakarta	Provinsi	10,384,581	1	4	3	4
<b>231</b>	Bantul	Kabupaten	3,446,419	1	3	2	3
<b>232</b>	Gunungkidul	Kabupaten	3,031,266	1	3	2	3
<b>233</b>	Kulonprogo	Kabupaten	2,371,620	1	3	2	3
<b>234</b>	Sleman	Kabupaten	4,889,673	1	3	3	3
<b>235</b>	Yogyakarta	Kota	4,246,893	1	3	3	3
<b>236</b>	Jawa Timur	Provinsi	41,619,420	1	3	3	3
<b>237</b>	Bangkalan	Kabupaten	3,219,383	1	2	2	2
<b>238</b>	Banyuwangi	Kabupaten	4,413,371	1	2	1	3
<b>239</b>	Blitar	Kabupaten	4,448,281	1	2	2	2
<b>240</b>	Bojonegoro	Kabupaten	12,750,710	1	3	3	2
<b>241</b>	Bondowoso	Kabupaten	2,956,231	1	2	2	3
<b>242</b>	Gresik	Kabupaten	6,306,091	1	3	2	3
<b>243</b>	Jember	Kabupaten	5,223,848	0	2	2	2
<b>244</b>	Jombang	Kabupaten	3,742,457	1	2	2	3
<b>245</b>	Kediri	Kabupaten	4,753,770	1	2	2	2
<b>246</b>	Lamongan	Kabupaten	5,359,757	1	3	2	3
<b>247</b>	Lumajang	Kabupaten	2,394,009	1	2	2	2
<b>248</b>	Madiun	Kabupaten	4,162,865	1	2	2	3
<b>249</b>	Magetan	Kabupaten	2,229,958	1	3	2	3
<b>250</b>	Malang	Kabupaten	6,985,183	1	3	3	3
<b>251</b>	Mojokerto	Kabupaten	5,925,977	1	2	2	3
<b>252</b>	Nganjuk	Kabupaten	3,351,351	1	2	2	2
<b>253</b>	Ngawi	Kabupaten	4,001,368	1	3	2	3
<b>254</b>	Pacitan	Kabupaten	2,349,171	1	2	2	2

<b>255</b>	Pamekasan	Kabupaten	3,649,901	1	2	2	3
<b>256</b>	Pasuruan	Kabupaten	4,257,002	1	2	2	3
<b>257</b>	Ponorogo	Kabupaten	2,618,670	1	2	2	3
<b>258</b>	Probolinggo	Kabupaten	2,441,287	1	2	2	3
<b>259</b>	Sampang	Kabupaten	4,025,493	1	2	2	2
<b>260</b>	Sidoarjo	Kabupaten	20,794,692	1	3	3	3
<b>261</b>	Situbondo	Kabupaten	3,679,611	1	2	2	3
<b>262</b>	Sumenep	Kabupaten	3,857,805	1	2	2	2
<b>263</b>	Trenggalek	Kabupaten	2,412,125	1	2	2	3
<b>264</b>	Tuban	Kabupaten	7,141,285	1	2	2	2
<b>265</b>	Tulungagung	Kabupaten	4,070,130	1	2	2	3
<b>266</b>	Batu	Kota	2,009,936	1	2	2	2
<b>267</b>	Blitar	Kota	2,644,733	1	2	2	3
<b>268</b>	Kediri	Kota	3,038,283	1	2	2	3
<b>269</b>	Madiun	Kota	2,658,741	1	3	2	3
<b>270</b>	Malang	Kota	6,391,773	1	3	3	3
<b>271</b>	Mojokerto	Kota	1,972,997	1	3	2	2
<b>272</b>	Pasuruan	Kota	3,097,452	0	3	2	2
<b>273</b>	Probolinggo	Kota	1,688,836	1	3	2	3
<b>274</b>	Surabaya	Kota	44,693,653	1	3	3	3
<b>275</b>	Banten	Provinsi	16,856,710	1	3	3	2
<b>276</b>	Lebak	Kabupaten	4,265,888	1	2	2	3
<b>277</b>	Pandeglang	Kabupaten	3,100,639	1	2	2	3
<b>278</b>	Serang	Kabupaten	3,817,359	1	2	2	3
<b>279</b>	Tangerang	Kabupaten	16,964,547	1	2	2	3
<b>280</b>	Cilegon	Kota	4,715,039	1	2	2	2

<b>281</b>	Serang	Kota	2,890,976	1	3	2	2
<b>282</b>	Tangerang	Kota	8,195,102	1	3	2	2
<b>283</b>	Tangerang Selatan	Kota	21,036,338	1	3	2	2
<b>284</b>	Bali	Provinsi	10,880,737	1	3	3	3
<b>285</b>	Badung	Kabupaten	13,418,079	1	3	3	3
<b>286</b>	Bangli	Kabupaten	1,312,035	1	3	2	3
<b>287</b>	Buleleng	Kabupaten	2,601,452	1	3	2	3
<b>288</b>	Gianyar	Kabupaten	2,616,666	1	2	3	3
<b>289</b>	Jembrana	Kabupaten	2,297,545	1	3	2	3
<b>290</b>	Karangasem	Kabupaten	1,504,712	1	3	3	3
<b>291</b>	Klungkung	Kabupaten	1,096,396	1	3	2	3
<b>292</b>	Tabanan	Kabupaten	2,264,694	1	3	3	3
<b>293</b>	Denpasar	Kota	6,229,493	1	3	2	3
<b>294</b>	Nusa Tenggara Barat	Provinsi	12,666,838	1	2	1	2
<b>295</b>	Bima	Kabupaten	2,690,543	1	2	2	2
<b>296</b>	Dompu	Kabupaten	1,763,547	1	1	1	2
<b>297</b>	Lombok Barat	Kabupaten	2,676,682	1	2	2	2
<b>298</b>	Lombok Tengah	Kabupaten	3,152,742	1	1	1	2
<b>299</b>	Lombok Timur	Kabupaten	3,501,590	1	2	2	2
<b>300</b>	Lombok Utara	Kabupaten	1,885,196	1	2	1	2
<b>301</b>	Sumbawa	Kabupaten	2,328,459	1	2	2	2
<b>302</b>	Sumbawa Barat	Kabupaten	3,273,196	1	2	1	2
<b>303</b>	Bima	Kota	1,501,659	1	2	2	2
<b>304</b>	Mataram	Kota	3,361,542	1	3	2	2
<b>305</b>	Nusa Tenggara Timur	Provinsi	9,148,346	1	3	3	2
<b>306</b>	Alor	Kabupaten	1,465,484	0	1	1	2

<b>307</b>	Belu	Kabupaten	1,600,324	1	2	2	2
<b>308</b>	Ende	Kabupaten	1,567,271	0	2	1	2
<b>309</b>	Flores Timur	Kabupaten	1,302,795	0	2	1	2
<b>310</b>	Kupang	Kabupaten	2,151,515	0	2	1	2
<b>311</b>	Lembata	Kabupaten	1,034,291	0	2	2	1
<b>312</b>	Malaka	Kabupaten	1,290,595	1	2	2	1
<b>313</b>	Manggarai	Kabupaten	2,014,904	1	2	2	2
<b>314</b>	Manggarai Barat	Kabupaten	2,044,731	1	2	2	2
<b>315</b>	Manggarai Timur	Kabupaten	1,559,649	1	2	2	2
<b>316</b>	Nagekeo	Kabupaten	2,083,912	1	2	2	2
<b>317</b>	Ngada	Kabupaten	1,728,188	1	2	2	2
<b>318</b>	Rote Ndao	Kabupaten	1,351,843	0	2	1	2
<b>319</b>	Sabu Raijua	Kabupaten	1,304,084	0	1	2	1
<b>320</b>	Sikka	Kabupaten	1,553,519	1	2	2	2
<b>321</b>	Sumba Barat	Kabupaten	1,295,143	0	2	2	2
<b>322</b>	Sumba Barat Daya	Kabupaten	1,563,039	0	2	2	1
<b>323</b>	Sumba Tengah	Kabupaten	987,677	0	1	1	2
<b>324</b>	Sumba Timur	Kabupaten	2,188,422	1	2	2	2
<b>325</b>	Timor Tengah Selatan	Kabupaten	1,985,155	1	2	2	2
<b>326</b>	Timor Tengah Utara	Kabupaten	2,444,600	0	1	2	2
<b>327</b>	Kupang	Kota	3,061,794	1	3	3	2
<b>328</b>	Kalimantan Barat	Provinsi	12,135,138	1	3	2	2
<b>329</b>	Bengkayang	Kabupaten	1,986,668	0	2	2	2
<b>330</b>	Kapuas Hulu	Kabupaten	3,292,252	1	2	2	2
<b>331</b>	Kayong Utara	Kabupaten	1,736,254	0	2	3	2
<b>332</b>	Ketapang	Kabupaten	4,844,561	1	3	2	2

333	Kubu Raya	Kabupaten	2,050,681	1	2	3	2
334	Landak	Kabupaten	2,362,888	1	2	2	2
335	Melawi	Kabupaten	2,362,888	1	2	3	2
336	Mempawah	Kabupaten	1,453,536	1	3	2	2
337	Sambas	Kabupaten	2,627,525	1	2	3	2
338	Sanggau	Kabupaten	2,763,036	1	2	2	2
339	Sekadau	Kabupaten	1,916,875	1	2	2	2
340	Sintang	Kabupaten	4,186,495	1	2	2	2
341	Pontianak	Kota	8,411,362	1	3	3	3
342	Singkawang	Kota	2,056,276	1	3	3	2
343	Kalimantan Tengah	Provinsi	11,697,945	1	2	2	2
344	Barito Selatan	Kabupaten	1,746,366	1	2	1	2
345	Barito Timur	Kabupaten	1,414,876	1	2	2	2
346	Barito Utara	Kabupaten	3,750,473	1	2	2	2
347	Gunung Mas	Kabupaten	2,041,329	1	2	2	2
348	Kapuas	Kabupaten	3,633,538	1	3	2	2
349	Katingan	Kabupaten	3,296,787	1	3	2	2
350	Kotawaringin Barat	Kabupaten	2,725,432	1	3	2	2
351	Kotawaringin Timur	Kabupaten	3,537,781	1	2	2	2
352	Lamandau	Kabupaten	1,642,684	1	2	2	2
353	Murung Raya	Kabupaten	2,726,553	1	2	1	2
354	Pulang Pisau	Kabupaten	1,871,272	1	2	2	2
355	Seruyan	Kabupaten	3,279,683	1	2	1	2
356	Sukamara	Kabupaten	2,119,923	1	2	1	2
357	Palangkaraya	Kota	3,350,573	1	3	2	2
358	Kalimantan Selatan	Provinsi	18,539,919	1	2	2	3

<b>359</b>	Balangan	Kabupaten	2,544,439	1	3	2	2
<b>360</b>	Banjar	Kabupaten	3,788,996	1	3	2	2
<b>361</b>	Barito Kuala	Kabupaten	2,302,431	1	2	2	2
<b>362</b>	Hulu Sungai Selatan	Kabupaten	3,370,051	1	3	2	3
<b>363</b>	Hulu Sungai Tengah	Kabupaten	2,181,766	1	3	2	2
<b>364</b>	Hulu Sungai Utara	Kabupaten	2,621,491	1	3	2	2
<b>365</b>	Kotabaru	Kabupaten	3,119,574	1	2	1	2
<b>366</b>	Tabalong	Kabupaten	3,909,592	1	2	2	2
<b>367</b>	Tanah Bumbu	Kabupaten	3,869,808	1	2	1	2
<b>368</b>	Tanah Laut	Kabupaten	4,249,756	1	2	1	2
<b>369</b>	Tapin	Kabupaten	2,341,388	1	2	2	2
<b>370</b>	Banjar Baru	Kota	2,950,314	1	2	2	2
<b>371</b>	Banjarmasin	Kota	5,432,994	1	3	2	3
<b>372</b>	Kalimantan Timur	Provinsi	33,873,059	1	3	2	3
<b>373</b>	Berau	Kabupaten	8,802,282	1	2	2	2
<b>374</b>	Kutai Barat	Kabupaten	6,327,956	1	2	2	2
<b>375</b>	Kutai Kartanegara	Kabupaten	17,858,534	1	2	2	2
<b>376</b>	Kutai Timur	Kabupaten	9,780,644	1	3	2	2
<b>377</b>	Mahakam Ulu	Kabupaten	2,165,414	1	2	2	2
<b>378</b>	Paser	Kabupaten	7,224,784	1	2	2	2
<b>379</b>	Penajam Paser Utara	Kabupaten	4,445,517	1	2	1	2
<b>380</b>	Balikpapan	Kota	11,649,591	1	3	3	2
<b>381</b>	Bontang	Kota	4,837,712	1	3	3	2
<b>382</b>	Samarinda	Kota	19,087,291	1	3	3	2
<b>383</b>	Kalimantan Utara	Provinsi	7,178,614	1	3	3	3
<b>384</b>	Bulungan	Kabupaten	5,938,886	1	3	2	2

<b>385</b>	Malinau	Kabupaten	4,912,975	1	2	2	2
<b>386</b>	Nunukan	Kabupaten	4,823,118	1	2	2	2
<b>387</b>	Tana Tidung	Kabupaten	3,069,862	1	2	1	2
<b>388</b>	Tarakan	Kota	6,102,475	1	3	2	2
<b>389</b>	Sulawesi Utara	Provinsi	9,225,865	1	2	1	2
<b>390</b>	Bolaang Mongondow	Kabupaten	1,580,832	0	1	2	2
<b>391</b>	Bolaang Mongondow Selatan	Kabupaten	1,122,678	1	1	1	2
<b>392</b>	Bolaang Mongondow Timur	Kabupaten	996,339	1	1	2	2
<b>393</b>	Bolaang Mongondow Utara	Kabupaten	1,212,409	1	2	2	2
<b>394</b>	Kepulauan Sangihe	Kabupaten	1,608,497	1	1	2	2
<b>395</b>	Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	Kabupaten	1,378,395	1	2	2	2
<b>396</b>	Kepulauan Talaud	Kabupaten	1,285,217	1	1	1	2
<b>397</b>	Minahasa	Kabupaten	2,013,278	1	1	1	2
<b>398</b>	Minahasa Selatan	Kabupaten	1,774,121	1	2	2	2
<b>399</b>	Minahasa Tenggara	Kabupaten	1,450,379	1	2	1	2
<b>400</b>	Minahasa Utara	Kabupaten	1,622,583	1	1	2	2
<b>401</b>	Bitung	Kota	1,884,448	1	2	2	2
<b>402</b>	Kotamobagu	Kota	1,226,094	1	2	2	2
<b>403</b>	Manado	Kota	3,323,101	1	3	2	3
<b>404</b>	Tomohon	Kota	1,632,473	1	2	2	2
<b>405</b>	Sulawesi Tengah	Provinsi	6,115,056	1	3	2	2
<b>406</b>	Banggai	Kabupaten	2,329,977	1	2	2	3
<b>407</b>	Banggai Kepulauan	Kabupaten	3,209,325	1	2	2	2
<b>408</b>	Banggai Laut	Kabupaten	1,104,959	1	2	2	2

409	Buol	Kabupaten	1,899,873	1	2	2	2
410	Donggala	Kabupaten	2,590,033	1	3	2	2
411	Morowali	Kabupaten	2,155,490	1	2	2	1
412	Morowali Utara	Kabupaten	1,631,293	1	2	2	1
413	Parigi Moutong	Kabupaten	2,472,322	1	2	2	2
414	Poso	Kabupaten	2,263,694	1	2	2	2
415	Sigi	Kabupaten	2,071,109	1	2	2	2
416	Tojo Una-Una	Kabupaten	1,909,554	1	2	2	2
417	Tolitoli	Kabupaten	2,080,408	1	2	2	2
418	Palu	Kota	3,608,739	1	3	2	2
419	Sulawesi Selatan	Provinsi	17,870,554	1	3	2	2
420	Bantaeng	Kabupaten	2,190,597	1	2	2	2
421	Barru	Kabupaten	2,235,575	1	3	2	2
422	Bone	Kabupaten	2,855,437	1	2	2	2
423	Bulukumba	Kabupaten	2,471,352	1	3	2	2
424	Enrekang	Kabupaten	1,912,949	1	2	2	2
425	Gowa	Kabupaten	3,903,055	1	2	2	2
426	Jeneponto	Kabupaten	2,259,587	0	2	2	2
427	Kepulauan Selayar	Kabupaten	2,097,026	1	2	2	2
428	Luwu	Kabupaten	2,491,141	1	2	2	2
429	Luwu Timur	Kabupaten	3,174,469	1	2	2	2
430	Luwu Utara	Kabupaten	1,512,068	1	3	2	2
431	Maros	Kabupaten	3,016,366	1	2	2	2
432	Pangkajene dan Kepulauan	Kabupaten	2,199,821	1	3	2	2
433	Pinrang	Kabupaten	2,871,764	1	2	2	2
434	Sidenreng Rappang	Kabupaten	2,667,157	1	2	2	2

<b>435</b>	Sinjai	Kabupaten	2,096,684	1	2	2	2
<b>436</b>	Soppeng	Kabupaten	2,325,572	1	2	2	2
<b>437</b>	Takalar	Kabupaten	1,543,635	0	2	2	2
<b>438</b>	Tana Toraja	Kabupaten	3,585,665	0	2	2	2
<b>439</b>	Toraja Utara	Kabupaten	8,991,160	1	2	2	2
<b>440</b>	Wajo	Kabupaten	3,209,786	1	2	2	2
<b>441</b>	Makassar	Kota	28,917,379	1	3	3	2
<b>442</b>	Palopo	Kota	2,252,531	1	2	2	2
<b>443</b>	Parepare	Kota	2,192,071	1	3	2	2
<b>444</b>	Sulawesi Tenggara	Provinsi	10,808,634	1	3	1	2
<b>445</b>	Bombana	Kabupaten	1,744,131	1	2	2	2
<b>446</b>	Buton	Kabupaten	1,676,382	1	2	2	2
<b>447</b>	Buton Selatan	Kabupaten	1,039,143	1	2	2	2
<b>448</b>	Buton Tengah	Kabupaten	1,728,031	1	2	2	2
<b>449</b>	Buton Utara	Kabupaten	1,461,385	1	2	2	2
<b>450</b>	Kolaka	Kabupaten	2,169,705	1	2	2	2
<b>451</b>	Kolaka Timur	Kabupaten	1,200,864	1	2	2	2
<b>452</b>	Kolaka Utara	Kabupaten	1,817,822	1	2	2	2
<b>453</b>	Konawe	Kabupaten	1,985,794	1	2	2	2
<b>454</b>	Konawe Kepulauan	Kabupaten	1,031,002	1	2	2	2
<b>455</b>	Konawe Selatan	Kabupaten	1,988,864	0	2	2	2
<b>456</b>	Konawe Utara	Kabupaten	1,396,048	1	2	2	2
<b>457</b>	Muna	Kabupaten	2,461,345	1	2	2	2
<b>458</b>	Muna Barat	Kabupaten	1,114,289	1	2	2	1
<b>459</b>	Wakatobi	Kabupaten	1,707,735	1	2	2	2
<b>460</b>	Baubau	Kota	2,354,948	1	2	2	2

461	Kendari	Kota	5,200,999	1	2	2	2
462	Gorontalo	Provinsi	2,326,599	1	3	3	2
463	Boalemo	Kabupaten	1,503,133	1	2	2	2
464	Bone Bolango	Kabupaten	1,464,851	1	2	2	3
465	Gorontalo	Kabupaten	1,667,122	1	2	2	2
466	Gorontalo Utara	Kabupaten	1,086,035	1	2	2	2
467	Pohuwatu	Kabupaten	1,334,977	1	2	2	2
468	Gorontalo	Kota	1,505,715	1	2	2	2
469	Sulawesi Barat	Provinsi	2,912,922	1	3	2	2
470	Majene	Kabupaten	1,586,901	1	2	2	2
471	Mamasa	Kabupaten	1,436,300	1	2	2	2
472	Mamuju	Kabupaten	2,195,520	1	2	2	2
473	Mamuju Tengah	Kabupaten	1,276,549	1	2	2	1
474	Mamuju Utara	Kabupaten	1,959,789	1	2	2	1
475	Polewali Mandar	Kabupaten	2,248,222	1	2	2	2
476	Maluku	Provinsi	5,188,783	1	3	3	2
477	Buru	Kabupaten	1,372,125	1	1	1	2
478	Buru Selatan	Kabupaten	1,536,611	0	3	1	1
479	Kepulauan Aru	Kabupaten	1,659,126	0	1	2	2
480	Maluku Barat Daya	Kabupaten	1,607,874	1	2	2	2
481	Maluku Tengah	Kabupaten	2,686,287	1	2	2	2
482	Maluku Tenggara	Kabupaten	1,497,439	1	2	2	2
483	Maluku Tenggara Barat	Kabupaten	1,692,847	1	2	2	2
484	Seram Bagian Barat	Kabupaten	1,336,803	0	2	1	1
485	Seram Bagian Timur	Kabupaten	1,905,215	0	2	1	1
486	Ambon	Kota	1,756,170	1	3	2	2

<b>487</b>	Tual	Kota	1,225,708	1	2	2	2
<b>488</b>	Maluku Utara	Provinsi	4,844,502	1	3	1	2
<b>489</b>	Halmahera Barat	Kabupaten	1,392,154	1	2	2	1
<b>490</b>	Halmahera Selatan	Kabupaten	2,000,225	1	2	2	2
<b>491</b>	Halmahera Tengah	Kabupaten	2,184,491	1	2	2	1
<b>492</b>	Halmahera Timur	Kabupaten	2,315,061	1	2	2	1
<b>493</b>	Halmahera Utara	Kabupaten	1,780,576	1	2	2	2
<b>494</b>	Kepulauan Sula	Kabupaten	1,553,335	1	2	2	1
<b>495</b>	Pulau Morotai	Kabupaten	1,206,208	1	2	2	2
<b>496</b>	Pulau Taliabu	Kabupaten	1,365,105	0	2	2	1
<b>497</b>	Ternate	Kota	2,482,041	1	2	1	2
<b>498</b>	Tidore	Kota	1,612,509	1	2	1	2
<b>499</b>	Prov Papua	Provinsi	24,576,201	1	1	1	2
<b>500</b>	Asmat	Kabupaten	2,618,627	1	1	2	2
<b>501</b>	Biak Numfor	Kabupaten	1,444,514	0	1	1	1
<b>502</b>	Boven Digoel	Kabupaten	3,751,532	0	2	1	1
<b>503</b>	Deiyai	Kabupaten	1,385,971	0	2	1	1
<b>504</b>	Dogiyai	Kabupaten	1,642,535	0	2	1	1
<b>505</b>	Intan Jaya	Kabupaten	2,884,947	0	2	1	2
<b>506</b>	Jayapura	Kabupaten	2,403,635	1	2	1	2
<b>507</b>	Jayawijaya	Kabupaten	2,893,400	1	2	2	2
<b>508</b>	Keerom	Kabupaten	2,259,510	1	1	2	1
<b>509</b>	Kepulauan Yapen	Kabupaten	1,711,763	1	2	2	1
<b>510</b>	Lanny Jaya	Kabupaten	2,216,103	1	2	2	1
<b>511</b>	Mamberamo Raya	Kabupaten	2,482,866	0	1	1	1
<b>512</b>	Mamberamo Tengah	Kabupaten	2,200,863	0	1	2	2

513	Mappi	Kabupaten	2,839,008	0	1	1	1
514	Merauke	Kabupaten	5,298,145	1	2	2	1
515	Mimika	Kabupaten	5,554,611	1	1	2	1
516	Nabire	Kabupaten	2,152,087	1	2	2	1
517	Nduga	Kabupaten	2,362,958	0	2	1	3
518	Paniai	Kabupaten	1,487,297	1	2	2	1
519	Pegunungan Bintang	Kabupaten	3,116,286	1	1	2	1
520	Puncak	Kabupaten	2,178,982	1	2	2	1
521	Puncak Jaya	Kabupaten	2,036,294	1	1	2	1
522	Sarmi	Kabupaten	2,142,314	0	2	2	1
523	Supiori	Kabupaten	2,181,749	1	2	2	1
524	Tolikara	Kabupaten	2,493,716	0	1	2	1
525	Yahukimo	Kabupaten	1,880,979	1	2	2	1
526	Yalimo	Kabupaten	1,781,722	1	2	2	1
527	Jayapura	Kota	2,686,353	1	2	2	2
528	Papua Barat	Provinsi	15,683,236	1	2	1	2
529	Fakfak	Kabupaten	3,211,828	1	1	2	1
530	Kaimana	Kabupaten	2,595,894	1	1	1	1
531	Manokwari	Kabupaten	2,676,478	1	1	2	2
532	Manokwari Selatan	Kabupaten	1,046,557	1	2	1	1
533	Maybrat	Kabupaten	1,876,694	1	2	2	2
534	Pegunungan Arfak	Kabupaten	1,516,653	0	1	1	2
535	Raja Ampat	Kabupaten	2,918,452	1	2	2	2
536	Sorong	Kabupaten	4,988,079	1	2	2	3
537	Sorong Selatan	Kabupaten	2,386,409	1	2	2	2
538	Tambrau	Kabupaten	2,570,982	1	1	2	2

<b>539</b>	Teluk Bintuni	Kabupaten	5,471,031	1	2	2	2
<b>540</b>	Teluk Wondama	Kabupaten	2,068,405	1	2	1	2
<b>541</b>	Sorong	Kota	4,177,081	1	1	2	1



### Lampiran 1. 3 Model Penelitian

